



Oleh Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf
IBM - ASMI

KONSOLIDASI KEKUASAAN DAN MASA DEPAN DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

1 Apa yang Dimaksud?



Konsolidasi kekuasaan adalah proses pemusatan pengaruh politik, ekonomi, birokrasi, dan informasi pada kelompok atau aktor yang semakin terbatas. Dalam konteks Indonesia, gejala ini tampak pada menguatnya koalisi besar, relasi elite-bisnis, serta meningkatnya dominasi jaringan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan.

2 Mengapa Terjadi?



- Biaya politik yang tinggi
- Koalisi pemerintahan yang sangat luas
- Ketergantungan pada oligarki ekonomi
- Patronase birokrasi dan akses regulasi
- Kontrol narasi melalui media dan platform digital

3 Dampak Positif Potensial



- Stabilitas kebijakan jangka pendek
- Koordinasi pembangunan lebih cepat
- Percepatan proyek strategis dan hilirisasi
- Kapasitas negara lebih terpusat

4 Risiko bagi Demokrasi Ekonomi



- Checks and balances melemah
- Kompetisi usaha menjadi tidak setara
- UMKM, koperasi, dan daerah tertinggal
- Kebijakan rentan state capture
- Ketimpangan akses modal, lahan, dan informasi
- Pertumbuhan tidak otomatis menjadi kesejahteraan inklusif

Indikator yang Harus Dipantau



- ✓ Kualitas rule of law
- ✓ Independensi lembaga
- ✓ Persaingan usaha sehat
- ✓ Gini ratio & kemiskinan
- ✓ Akses kredit UMKM
- ✓ Kualitas pekerjaan dan produktivitas
- ✓ Partisipasi publik dalam kebijakan

6 Pertanyaan Kunci Masa Depan

“Apakah Indonesia akan bergerak menuju stabilitas yang inklusif, atau justru menuju konsentrasi kekuasaan yang mempersempit kesempatan ekonomi?”

7 Agenda Pembaruan



Reformasi pendanaan politik



Penguatan lembaga pengawas dan peradilan



Transparansi kebijakan publik



Penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi daerah



Perlindungan persaingan usaha yang adil



Literasi digital, civic tech, dan partisipasi warga



“Masa depan demokrasi ekonomi Indonesia ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas kekuasaan, keadilan distribusi, dan partisipasi publik.”





RudyCT Academic Series

Demokrasi • Ekonomi • Tata Kelola

Konsolidasi Kekuasaan dan Masa Depan Demokrasi Ekonomi Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

IBM - ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Bogor - 2026

[RudyCT Academic Series](#) 2026

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan antara konsolidasi kekuasaan politik dan masa depan demokrasi ekonomi Indonesia. Argumen utamanya ialah bahwa demokrasi ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan produk domestik bruto, penurunan kemiskinan, atau besarnya investasi, melainkan dari distribusi kemampuan warga untuk memengaruhi keputusan publik, mengakses aset produktif, memperoleh pekerjaan bermutu, memasuki pasar secara adil, serta menikmati perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks Indonesia kontemporer, pertumbuhan ekonomi tetap relatif kuat, tetapi ruang kompetisi politik, kualitas checks and balances, konflik kepentingan antara jabatan publik dan kepemilikan bisnis, biaya politik yang tinggi, serta konsentrasi sumber daya ekonomi menciptakan risiko bahwa konsolidasi kekuasaan politik bertransformasi menjadi konsolidasi kekuasaan ekonomi. Artikel menggunakan pendekatan ekonomi-politik institusional, teori oligarki, democratic backsliding, inclusive institutions, dan constitutional political economy dengan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai jangkar normatif. Data terbaru BPS menunjukkan ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,29 persen year-on-year pada triwulan II-2026; kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, tetapi Gini Ratio naik menjadi 0,368. Pada saat bersamaan, Freedom House 2026 menilai Indonesia 56/100 atau Partly Free dan V-Dem 2026 mencatat penurunan pada sejumlah dimensi demokrasi. Artikel menyimpulkan bahwa masa depan demokrasi ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan negara mengubah pertumbuhan menjadi perluasan kapabilitas warga sekaligus membangun pagar institusional terhadap capture: transparansi pembiayaan politik, penguatan lembaga pengawas, kebijakan persaingan, reformasi pengadaan dan BUMN, perlindungan pekerja, penguatan UMKM-koperasi, reforma agraria yang kredibel, tata kelola sumber daya alam, keterbukaan data, serta partisipasi publik yang bermakna. Konsolidasi negara tidak selalu identik dengan otoritarianisme; ia dapat menjadi kapasitas pembangunan yang produktif jika diimbangi akuntabilitas, pluralisme, rule of law, dan distribusi kesempatan ekonomi yang luas.

Kata Kunci: konsolidasi kekuasaan; demokrasi ekonomi; oligarki; ekonomi politik; institusi inklusif; ketimpangan; kebijakan publik; Indonesia; Pasal 33 UUD 1945; tata kelola.

Indikator Konteks Indonesia 2025-2026

Indikator	Angka terbaru	Makna analitis
Pertumbuhan PDB 2025	5,11%	Pertumbuhan tetap solid, tetapi tidak otomatis identik dengan demokratisasi akses ekonomi.
Pertumbuhan PDB Triwulan II-2026	5,29% y-on-y	Momentum makro masih kuat; konsumsi dan belanja pemerintah penting.
Kemiskinan Maret 2026	8,07% / 22,93 juta orang	Kemajuan kesejahteraan agregat, tetapi kerentanan dan kualitas pekerjaan tetap penting.
Gini Ratio Maret 2026	0,368	Naik dari 0,363 pada September 2025; distribusi hasil pertumbuhan perlu diawasi.
TPT Februari 2026	4,68%	Pengangguran terbuka turun, namun kualitas kerja dan upah menjadi isu berikutnya.
Freedom House 2026	56/100 - Partly Free	Menunjukkan demokrasi elektoral masih hidup dengan kelemahan pada hak dan kebebasan sipil.
V-Dem 2026	penurunan pada sejumlah indeks	Memberi sinyal democratic regression meskipun kompetisi politik belum hilang.

Daftar Isi Ringkas

1. Pendahuluan: Dari Demokrasi Politik ke Demokrasi Ekonomi
2. Kerangka Konseptual: Kekuasaan, Oligarki, dan Institusi
3. Pasal 33 UUD 1945 dan Etika Konstitusional Demokrasi Ekonomi
4. Evolusi Konsolidasi Kekuasaan dalam Ekonomi Politik Indonesia
5. Indonesia 2025-2026: Pertumbuhan, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pekerjaan
6. Ketika Kekuasaan Politik Bertemu Kekuasaan Ekonomi
7. Hilirisasi, BUMN, Investasi, dan Negara Pembangunan
8. Fiskal, Anggaran, dan Distribusi Kewargaan Ekonomi
9. UMKM, Koperasi, Pekerja, dan Demokrasi dari Bawah
10. Digitalisasi, AI, Platform, dan Konsentrasi Baru
11. Daerah, Sumber Daya Alam, dan Demokrasi Ekonomi Teritorial

12. Skenario Masa Depan 2026-2045
13. Agenda Reformasi: Membangun Negara Kuat yang Tetap Demokratis
14. Implikasi bagi Manajemen dan Pendidikan Tinggi
15. Kesimpulan

1. Pendahuluan: Dari Demokrasi Politik ke Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah konsep yang mengingatkan bahwa kebebasan politik kehilangan sebagian maknanya apabila warga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menggunakan kebebasan tersebut. Hak memilih, kebebasan menyatakan pendapat, dan pergantian pemerintahan melalui pemilu merupakan fondasi, tetapi kehidupan demokratis juga bergantung pada akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, modal, tanah, teknologi, layanan publik, dan perlindungan hukum. Karena itu demokrasi ekonomi menempatkan warga bukan hanya sebagai pemilih, konsumen, atau penerima bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki daya tawar. Dalam masyarakat dengan konsentrasi aset yang tinggi, hubungan antara kekuasaan politik dan ekonomi cenderung saling memperkuat. Mereka yang memiliki sumber daya besar lebih mudah membiayai organisasi, mengakses pengambil keputusan, membentuk agenda media, memperoleh informasi, dan menanggung biaya transaksi politik. Di sisi lain, aktor politik yang menguasai regulasi, izin, pengadaan, konsesi, dan kebijakan fiskal dapat menghasilkan rente ekonomi. Titik temu kedua proses inilah yang membuat pembahasan konsolidasi kekuasaan menjadi relevan bagi masa depan demokrasi ekonomi Indonesia.

Istilah konsolidasi kekuasaan perlu digunakan secara hati-hati. Setiap negara membutuhkan kapasitas untuk mengambil keputusan, mengoordinasikan birokrasi, menegakkan hukum, mengelola krisis, dan melaksanakan strategi pembangunan jangka panjang. Negara yang terlalu terfragmentasi juga dapat gagal menyediakan barang publik. Masalah muncul ketika konsolidasi berubah menjadi pemusatan keputusan tanpa koreksi, pengurangan transparansi, pelemahan oposisi, pengerdilan lembaga pengawas, atau penyatuan kepentingan publik dengan kepentingan kelompok dominan. Dalam kerangka ini, pertanyaan analitisnya bukan apakah negara kuat atau lemah, melainkan kuat untuk siapa, diawasi oleh siapa, dan hasilnya didistribusikan kepada siapa. Negara pembangunan yang efektif membutuhkan otoritas, tetapi demokrasi membutuhkan otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan tersebut menjadi sangat penting di Indonesia karena negara menghadapi agenda industrialisasi, transisi energi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, perlindungan sosial, digitalisasi, serta tekanan geopolitik yang menuntut koordinasi cepat sekaligus keputusan bernilai ekonomi sangat besar.

Kondisi mutakhir memperlihatkan paradoks. BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024, dan pertumbuhan triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen year-on-year. Kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Namun Gini Ratio Maret 2026 sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025. Di pasar kerja, TPT Februari 2026 sebesar 4,68 persen dan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,29 juta per bulan. Data ini tidak menyatakan bahwa Indonesia gagal; sebaliknya, ia menunjukkan capaian yang perlu diapresiasi. Tetapi demokrasi ekonomi menuntut pembacaan yang lebih dalam: kualitas pekerjaan, stabilitas pendapatan, produktivitas, kepemilikan aset, akses kredit, biaya perumahan, kemampuan naik kelas, dan kesempatan

generasi muda. Pertumbuhan yang tinggi dapat hidup berdampingan dengan rasa tidak aman apabila mobilitas sosial tersendat atau jika keuntungan dari transformasi ekonomi terkonsentrasi.

Pada sisi politik, Freedom House 2026 memberi Indonesia skor 56 dari 100 dan kategori Partly Free. V-Dem Democracy Report 2026 juga menempatkan Indonesia dalam tren penurunan pada sejumlah ukuran demokrasi. Indeks internasional tentu bukan kebenaran tunggal dan metodologinya dapat diperdebatkan; namun ia berguna sebagai sinyal komparatif. Literatur akademik Indonesia sejak akhir 2010-an telah membahas democratic regression, illiberalism, elite collusion, klientelisme, dan oligarki. Aspinall dan Mietzner menyebut paradoks demokrasi Indonesia: pemilu tetap kompetitif, tetapi kualitas liberal demokrasi menghadapi tekanan. Damanik, Rompas, Nadia, Berenschot, dan Warburton pada 2025 memperlihatkan meningkatnya keterhubungan langsung antara politisi dan dunia bisnis, dan menyebut munculnya politico-capitalists. Temuan tersebut relevan bagi demokrasi ekonomi karena konflik kepentingan tidak hanya merupakan masalah etika individual; ia dapat mengubah struktur insentif kebijakan.

Artikel ini karena itu mengajukan tesis bahwa masa depan demokrasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh tiga keseimbangan. Pertama, keseimbangan antara kapasitas negara dan pembatasan kekuasaan. Kedua, keseimbangan antara akumulasi modal yang dibutuhkan untuk industrialisasi dan penyebaran kesempatan ekonomi kepada masyarakat luas. Ketiga, keseimbangan antara stabilitas kebijakan dan kompetisi gagasan. Jika kapasitas negara menguat sementara checks and balances melemah, konsolidasi dapat menghasilkan policy capture. Jika regulasi persaingan, transparansi, dan hak pekerja diperkuat, kapasitas yang sama justru dapat dipakai untuk memperluas kesejahteraan. Dengan demikian, konsolidasi kekuasaan bukan variabel tunggal yang otomatis buruk; dampaknya bergantung pada institusi yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, diperiksa, dan dialihkan.

2. Kerangka Konseptual: Kekuasaan, Oligarki, dan Institusi

Kekuasaan dalam ekonomi-politik dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menentukan aturan, mengalokasikan sumber daya, membentuk preferensi, dan memengaruhi keputusan orang lain. Kekuasaan tidak selalu tampil sebagai perintah. Ia dapat berada di dalam struktur kepemilikan, ketergantungan pembiayaan, monopoli informasi, desain regulasi, atau kemampuan menetapkan agenda. Pendekatan ini penting karena demokrasi formal dapat tetap berjalan sementara distribusi kekuasaan substantif sangat timpang. Pemilu menentukan siapa yang menduduki jabatan, tetapi akses terhadap modal kampanye, jaringan media, konsultan, relasi bisnis, dan dukungan organisasi dapat menentukan siapa yang realistis mampu bersaing. Karena itu analisis demokrasi ekonomi harus bergerak dari prosedur ke struktur.

Teori oligarki Jeffrey Winters memusatkan perhatian pada aktor yang mengendalikan sumber daya material sangat besar dan menggunakan sebagian sumber tersebut untuk mempertahankan kekayaan serta posisi. Dalam konteks demokrasi, oligarki tidak harus menghapus pemilu. Ia dapat beradaptasi dengan pemilu melalui pendanaan politik, pembentukan koalisi, kontrol aset media, lobi kebijakan, dan penetrasi ke partai. Indonesia pasca-Reformasi penting karena demokratisasi tidak serta-merta menghilangkan kekuatan ekonomi lama; sebagian kekuatan tersebut beradaptasi dengan arena baru.

Decentralization juga memindahkan banyak arena perebutan rente ke daerah, membuka kesempatan partisipasi tetapi juga memperluas variasi klientelisme lokal.

Konsep state capture menjelaskan keadaan ketika keputusan publik secara sistematis dipengaruhi kepentingan privat yang memiliki kapasitas lebih besar dibanding warga biasa. Capture berbeda dari korupsi transaksional sederhana. Suap dapat terjadi pada keputusan tertentu; capture bekerja lebih struktural dengan memengaruhi aturan permainan, desain perizinan, spesifikasi proyek, perlindungan pasar, kebijakan pajak, atau proses legislasi. Capture juga bisa legal secara formal bila jaringan kepentingan berhasil mendorong aturan yang menguntungkan dirinya. Karena itu jawabannya tidak cukup berupa penindakan pidana; diperlukan transparansi konflik kepentingan, beneficial ownership, keterbukaan lobi, pengadaan terbuka, audit kebijakan, dan competition policy.

Literatur institusi inklusif menekankan bahwa pembangunan jangka panjang lebih mungkin bertahan ketika institusi politik dan ekonomi membuka partisipasi luas, melindungi hak, dan mengurangi kemampuan elite melakukan ekstraksi. Namun dikotomi inklusif-ekstraktif tidak boleh dibaca secara terlalu sederhana. Negara berkembang sering memerlukan koordinasi industri, perlindungan sektor strategis, dan investasi publik berskala besar. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan industri memiliki disiplin kinerja, batas waktu, transparansi, dan akses kompetitif, atau justru menjadi mekanisme redistribusi rente kepada kelompok tertentu. Di sinilah demokrasi ekonomi bertemu dengan teori developmental state.

Democratic backsliding biasanya berlangsung bukan melalui kudeta terbuka, melainkan perubahan bertahap: pelemahan oposisi, tekanan terhadap media, politisasi lembaga, perubahan aturan pemilu, delegitimasi kritik, atau penggunaan hukum secara selektif. Dalam ekonomi, mekanisme paralel dapat terjadi melalui pemusatan izin, proyek, dan akses pembiayaan pada jaringan dekat kekuasaan. Karena perubahan berlangsung bertahap, indikator makro yang positif dapat menutupi perubahan institusional. Pertumbuhan bahkan dapat memberi legitimasi pada konsolidasi bila publik menerima pertukaran antara kesejahteraan material dan pengurangan kontrol demokratis. Tetapi sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa ketergantungan pada kinerja ekonomi sebagai sumber legitimasi menjadi rapuh ketika pertumbuhan melambat.

Kerangka yang digunakan artikel ini karena itu menggabungkan empat lapisan: aturan formal, jaringan elite, distribusi aset, dan outcome kesejahteraan. Aturan formal meliputi konstitusi, undang-undang, lembaga pengawasan, pemilu, dan persaingan usaha. Jaringan elite meliputi hubungan bisnis-politik, koalisi, patronase, dan organisasi. Distribusi aset meliputi tanah, modal finansial, kepemilikan perusahaan, data, teknologi, dan akses pendidikan. Outcome meliputi pendapatan, pekerjaan, kesehatan, mobilitas sosial, dan rasa aman. Demokrasi ekonomi dinilai kuat ketika keempat lapisan membentuk sirkulasi kekuasaan yang terbuka, bukan ketika satu lapisan saja tampak baik.

3. Pasal 33 UUD 1945 dan Etika Konstitusional Demokrasi Ekonomi

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar normatif paling penting bagi pembahasan demokrasi ekonomi Indonesia. Rumusan tentang perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi yang penting, dan penggunaan bumi, air, serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menolak pandangan bahwa ekonomi semata-mata wilayah

pertukaran privat. Setelah amandemen, prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Norma ini memberi pesan bahwa efisiensi dan keadilan bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan secara mutlak.

Makna 'dikuasai oleh negara' juga perlu dibedakan dari 'dimiliki seluruhnya oleh pemerintah'. Penguasaan konstitusional dapat dijalankan melalui kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Dengan demikian, negara dapat melibatkan BUMN, swasta, koperasi, pemerintah daerah, dan masyarakat sepanjang desain kelembagaannya menjamin manfaat publik dan tidak menyerahkan kendali strategis tanpa akuntabilitas. Interpretasi ini penting agar Pasal 33 tidak dipakai untuk membenarkan monopoli negara yang tidak efisien, tetapi juga tidak direduksi menjadi legitimasi privatisasi tanpa perlindungan kepentingan umum.

Demokrasi ekonomi konstitusional mengandung gagasan kewargaan ekonomi. Warga mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai peserta yang setara di hadapan aturan ekonomi, bukan sekadar objek program. Implikasinya meliputi akses informasi, mekanisme keberatan, keterlibatan dalam AMDAL, konsultasi pengadaan tanah, perlindungan konsumen, hak berserikat pekerja, serta akses UMKM terhadap pengadaan dan pembiayaan. Kualitas demokrasi ekonomi karena itu dapat diukur dari prosedur: apakah keputusan dibuat secara transparan dan partisipatif; dari struktur: apakah pasar terbuka dan kompetitif; serta dari hasil: apakah kesejahteraan dan mobilitas sosial meningkat secara luas.

Asas kekeluargaan sering disalahpahami sebagai anti-kompetisi. Dalam masyarakat modern, kekeluargaan lebih produktif dibaca sebagai prinsip solidaritas dan mutualitas yang menolak dominasi satu pihak. Persaingan justru diperlukan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi, selama ia diatur agar tidak mengorbankan pekerja, konsumen, lingkungan, dan pelaku kecil. Koperasi menjadi salah satu bentuk kelembagaan penting karena menggabungkan kepemilikan dan partisipasi anggota, tetapi koperasi juga harus dikelola profesional, transparan, dan berbasis produktivitas. Demokrasi ekonomi bukan romantisisme kelembagaan; ia membutuhkan organisasi yang mampu bertahan dalam ekonomi digital dan rantai nilai global.

Pasal 33 juga memberi dasar untuk menilai hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, teknologi, ekspor, dan pekerjaan. Tetapi tujuan konstitusional baru terpenuhi jika nilai tambah tersebut menyebar menjadi pendapatan tenaga kerja, kemampuan pemasok lokal, penerimaan fiskal, kualitas lingkungan, dan kemajuan wilayah. Jika manfaat terutama berhenti pada pemegang konsesi, kontraktor besar, atau kelompok pemilik modal, hilirisasi mungkin berhasil secara industrial tetapi kurang berhasil sebagai demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu indikatornya harus melampaui jumlah smelter atau nilai ekspor.

4. Evolusi Konsolidasi Kekuasaan dalam Ekonomi Politik Indonesia

Sejarah ekonomi politik Indonesia memperlihatkan pergulatan berulang antara sentralisasi dan desentralisasi, negara dan pasar, serta mobilisasi massa dan kontrol elite. Pada masa Demokrasi Terpimpin, konsentrasi politik sangat tinggi sementara kapasitas ekonomi menghadapi krisis. Orde Baru kemudian membangun stabilitas, birokrasi pembangunan, industrialisasi, dan infrastruktur melalui

sentralisasi kuat. Pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan menjadi capaian penting, tetapi hubungan patronase antara negara, militer, birokrasi, dan bisnis juga menumbuhkan kronisme. Krisis 1997-1998 memperlihatkan kelemahan model ketika risiko sektor finansial, utang, dan hubungan bisnis-politik bertemu dengan guncangan eksternal.

Reformasi 1998 mengubah arsitektur kekuasaan melalui pemilu kompetitif, kebebasan pers, amandemen konstitusi, desentralisasi, penguatan lembaga independen, dan pembentukan KPK. Namun demokratisasi tidak terjadi di ruang kosong. Aktor ekonomi dan jaringan lama beradaptasi, partai membutuhkan pembiayaan, dan pilkada menciptakan pasar politik lokal. Aspinall dan Hicken menunjukkan bahwa klientelisme dapat bertahan melalui jaringan yang melampaui partai. Berenschot dan berbagai peneliti memperlihatkan bagaimana patronase menjadi mekanisme penting dalam distribusi keuntungan politik. Artinya Reformasi berhasil membuka kompetisi, tetapi tidak sepenuhnya mendemokratisasi sumber daya yang menopang kompetisi tersebut.

Pada dekade 2010-an, pembangunan infrastruktur, integrasi program sosial, dan ekspansi kapasitas negara kembali menjadi pusat agenda. Negara menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk mengoordinasikan investasi berskala besar dan membangun konektivitas. Namun sejumlah ilmuwan juga menandai penurunan kualitas demokrasi melalui kecenderungan koalisi besar, pelemahan oposisi, revisi institusi, tekanan hukum, dan menguatnya politik personalistik. Warburton dan Aspinall menjelaskan democratic regression sebagai hasil kombinasi struktur, agency elite, dan opini publik. Fenomena ini penting karena pembangunan fisik yang cepat dapat berdampingan dengan institusi politik yang kurang kompetitif.

Periode setelah Pemilu 2024 memperlihatkan dorongan kuat menuju kesinambungan pembangunan dan konsolidasi koalisi. Dari perspektif governance, koalisi luas dapat mengurangi veto dan mempercepat implementasi. Dari perspektif demokrasi, koalisi yang terlalu dominan dapat mempersempit oposisi formal dan mengurangi intensitas pengawasan parlemen. Efek akhirnya bergantung pada kekuatan media, masyarakat sipil, pengadilan, lembaga audit, akademisi, serta mekanisme internal partai. Demokrasi tidak membutuhkan konflik tanpa akhir, tetapi membutuhkan institusi yang membuat perbedaan kepentingan dapat terlihat, diperdebatkan, dan dikoreksi.

Konsolidasi kekuasaan di Indonesia juga harus dibaca dalam konteks geopolitik. Persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, perang dagang, transisi energi, kebutuhan mineral kritis, dan restrukturisasi rantai pasok memberi pemerintah peluang negosiasi baru. Negara yang memiliki koordinasi tinggi dapat menggunakan sumber daya strategis untuk memperoleh investasi teknologi dan kapasitas industri. Namun semakin besar nilai ekonomi keputusan geopolitik, semakin besar pula risiko rente. Transparansi kontrak, standardisasi insentif, kompetisi investor, transfer teknologi terukur, dan audit lingkungan menjadi perangkat demokrasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri ekonomi.

5. Indonesia 2025-2026: Pertumbuhan, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pekerjaan

Data 2025-2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia relatif tangguh. PDB 2025 tumbuh 5,11 persen dan PDB per kapita mencapai sekitar Rp83,7 juta atau USD5.083,4 menurut BPS. Pada triwulan I-2026 pertumbuhan year-on-year mencapai 5,61 persen, sedangkan triwulan II-2026 5,29 persen.

Semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini penting karena pertumbuhan memberi ruang fiskal, menciptakan permintaan tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan. Namun demokrasi ekonomi bertanya apakah pertumbuhan meningkatkan bargaining power warga atau hanya memperbesar ekonomi tanpa mengubah struktur kesempatan.

Kemiskinan Maret 2026 sebesar 8,07 persen merupakan kemajuan dibanding September 2025 dan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang. Penurunan kemiskinan adalah capaian yang tidak boleh diremehkan, khususnya karena rumah tangga menghadapi tekanan pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi garis kemiskinan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di atas garis tersebut tetap rentan terhadap kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau kenaikan harga. Karena itu agenda demokrasi ekonomi perlu bergerak dari poverty alleviation menuju economic security.

Ketimpangan memberi sinyal berbeda. Gini Ratio Maret 2026 tercatat 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025 meskipun lebih rendah daripada Maret 2025 sebesar 0,375. Di perkotaan Gini sebesar 0,387 dan di perdesaan 0,296. Perubahan kecil pada Gini tidak boleh dibaca secara dramatis, tetapi tren ini mengingatkan bahwa fase pertumbuhan dapat menghasilkan distribusi yang tidak otomatis progresif. Ketimpangan aset biasanya lebih tinggi daripada ketimpangan pengeluaran, sementara data Gini BPS terutama menangkap pengeluaran. Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan saham, tanah, properti, dan aset digital dapat lebih tajam daripada yang terlihat dalam Gini konsumsi.

Ketenagakerjaan Februari 2026 juga menunjukkan perbaikan dan tantangan. TPT sebesar 4,68 persen, dengan 147,67 juta orang bekerja. Pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menyerap sekitar 28,78 persen pekerja. Rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta per bulan. World Bank Indonesia Economic Prospects Juni 2026 mencatat meredanya tekanan PHK jangka pendek, tetapi menekankan persoalan struktural kualitas kerja dan stagnasi upah. Ini sangat relevan bagi demokrasi ekonomi: pekerjaan bukan hanya statistik terserap atau tidak terserap, tetapi sumber kemandirian. Pekerja dengan kontrak rapuh, upah stagnan, dan perlindungan sosial terbatas memiliki daya tawar politik-ekonomi yang lebih rendah.

Struktur spasial juga penting. Pulau Jawa menyumbang sekitar 56-57 persen ekonomi nasional pada 2025-2026. Konsentrasi aktivitas di Jawa menciptakan efisiensi aglomerasi, tetapi juga menghasilkan disparitas peluang. Kebijakan pembangunan kawasan, logistik, pendidikan, konektivitas digital, dan pusat inovasi perlu menghindari dua ekstrem: memaksakan pemerataan yang tidak ekonomis atau membiarkan konsentrasi berlangsung tanpa strategi penyeimbang. Demokrasi ekonomi teritorial berarti warga di luar pusat pertumbuhan memiliki akses nyata terhadap layanan berkualitas dan jaringan produksi nasional.

Data makro karena itu harus dibaca sebagai dashboard, bukan skor tunggal. Pertumbuhan, kemiskinan, Gini, dan TPT menggambarkan bagian penting, tetapi belum mencakup intergenerational mobility, wealth concentration, market power, kualitas institusi, atau distribusi pengaruh politik. Negara yang ingin mengejar Indonesia Emas 2045 membutuhkan indikator tambahan: produktivitas median, upah riil median, proporsi pekerjaan formal bermutu, survival rate UMKM, konsentrasi industri, akses kredit produktif, kepemilikan rumah generasi muda, serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan per desil pendapatan.

6. Ketika Kekuasaan Politik Bertemu Kekuasaan Ekonomi

Hubungan bisnis-politik menjadi pusat persoalan ketika jabatan publik, kepemilikan perusahaan, dan pembiayaan politik saling bertaut tanpa mekanisme pemisahan kepentingan yang kuat. Damanik dan kolega (2025) menemukan meningkatnya keterkaitan langsung anggota parlemen dan kabinet dengan perusahaan, sehingga mengembangkan konsep politico-capitalists: individu yang menyatukan kekuasaan politik dan ekonomi. Fenomena ini tidak berarti semua pengusaha yang masuk politik bertindak buruk. Pengalaman bisnis dapat membawa kompetensi. Persoalannya adalah asymmetric access: ketika sebagian aktor dapat memengaruhi regulasi yang memengaruhi bisnis mereka sendiri.

Biaya politik adalah mekanisme penting. Pemilu dalam wilayah geografis luas memerlukan kampanye, saksi, relawan, transportasi, media, dan infrastruktur digital. Ketika pembiayaan partai dari iuran anggota lemah dan pendanaan publik terbatas, kandidat bergantung pada kekayaan pribadi atau donor. Ketergantungan tersebut menimbulkan hutang politik yang tidak selalu tercatat. Reformasi pembiayaan politik karena itu bukan agenda moralistik, melainkan reformasi ekonomi kelembagaan. Publik perlu mengetahui sumber dana, batas kontribusi, penerima manfaat, serta relasi antara penyumbang dan kontrak pemerintah.

Koalisi besar juga memiliki implikasi ekonomi. Dalam sistem multipartai, power-sharing dapat menciptakan stabilitas dan inklusivitas elite. Slater dan Simmons menyebut pola promiscuous powersharing sebagai strategi elite menghadapi ketidakpastian. Namun power-sharing yang terlalu luas dapat mengurangi kompetisi programatik dan mengubah partai menjadi saluran pembagian posisi dan sumber daya. Jika oposisi kebijakan melemah, pengawasan terhadap proyek besar, konsesi, insentif pajak, dan penugasan BUMN dapat berkurang. Karena itu lembaga audit dan keterbukaan data harus semakin kuat justru ketika koalisi semakin luas.

Konflik kepentingan sering berada di zona abu-abu antara legal dan tidak etis. Seorang pejabat dapat mematuhi hukum formal tetapi tetap memiliki kepentingan finansial pada sektor yang ia atur. Solusi yang digunakan banyak demokrasi meliputi disclosure aset yang dapat diverifikasi, blind trust dalam kasus tertentu, recusal dari pengambilan keputusan, register lobi, cooling-off period, serta aturan revolving door. Indonesia dapat mengembangkan model yang sesuai dengan sistem hukumnya tanpa mengimpor seluruh desain negara lain. Prinsipnya sederhana: keputusan publik harus dapat diuji apakah dibuat untuk kepentingan umum.

Media merupakan arena lain. Demokrasi membutuhkan informasi yang plural. Konsentrasi kepemilikan media tidak otomatis menghasilkan manipulasi, tetapi menciptakan potensi konflik ketika pemilik aktif dalam politik. Era digital memang memperbanyak kanal, tetapi platform sosial memiliki algoritma yang menciptakan bentuk konsentrasi baru. Demokrasi ekonomi informasi membutuhkan transparansi iklan politik, deklarasi kepemilikan media, standar editorial, perlindungan jurnalis, dan literasi publik. Tanpa informasi, warga tidak dapat menilai trade-off kebijakan ekonomi yang kompleks.

Salah satu risiko terbesar konsolidasi adalah normalisasi akses istimewa. Ketika masyarakat menerima bahwa proyek publik wajar diarahkan kepada jaringan tertentu karena dianggap lebih cepat atau lebih mampu, efisiensi jangka pendek dapat mengorbankan contestability. Pasar yang sehat bukan pasar tanpa perusahaan besar; ia adalah pasar di mana perusahaan besar tetap dapat ditantang oleh pendatang baru. Demikian pula politik yang sehat bukan politik tanpa elite; ia adalah politik di mana elite dapat diganti, diawasi, dan dibatasi.

7. Hilirisasi, BUMN, Investasi, dan Negara Pembangunan

Hilirisasi adalah salah satu strategi ekonomi paling penting Indonesia. Larangan ekspor mineral mentah, pembangunan smelter, pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, serta perluasan industri berbasis sumber daya bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik. Secara strategis, kebijakan ini dapat mengurangi posisi Indonesia sebagai pemasok komoditas mentah. Tetapi keberhasilan demokrasi ekonomi membutuhkan lebih dari nilai ekspor. Pertanyaan yang harus diajukan adalah berapa proporsi nilai tambah yang menjadi upah, pajak, dividen domestik, kontrak pemasok lokal, transfer teknologi, dan pembangunan daerah.

Kebijakan industri hampir selalu menciptakan pemenang dan pecundang. Insentif fiskal, lahan, energi murah, proteksi perdagangan, dan fasilitas infrastruktur memiliki nilai ekonomi besar. Jika kriteria penerima tidak transparan, kebijakan industri rentan berubah menjadi industrial policy for insiders. Karena itu dukungan negara perlu disertai performance discipline: target ekspor, produktivitas, kandungan teknologi, pengembangan SDM, pengurangan emisi, dan keterlibatan pemasok lokal. Perusahaan yang gagal memenuhi target seharusnya kehilangan sebagian fasilitas. Dengan cara ini negara kuat tetap tunduk pada aturan.

BUMN memiliki posisi unik. Ia dapat menjadi instrumen pembangunan, stabilisasi, penyedia layanan strategis, dan katalis investasi. Namun BUMN juga dapat menjadi sumber contingent liabilities, cross-subsidy yang tidak transparan, atau kendaraan penugasan politik. Demokrasi ekonomi memerlukan pemisahan jelas antara mandat komersial dan public service obligation, kompensasi yang terukur, pengangkatan pengurus berbasis kompetensi, publikasi KPI, serta governance yang melindungi perusahaan dari intervensi non-ekonomis. Dalam proyek besar, evaluasi value-for-money perlu terbuka bagi pengawasan publik.

Investasi asing juga harus ditempatkan dalam kerangka bargaining, bukan dikotomi nasionalisme versus globalisasi. Modal asing dapat membawa teknologi, pasar, standar, dan pembiayaan; tetapi negara harus memiliki kapasitas untuk menegosiasikan manfaat jangka panjang. Local content tanpa kapabilitas dapat menjadi biaya; sebaliknya, keterbukaan penuh tanpa strategi dapat mengekalkan ketergantungan. Demokrasi ekonomi mengharuskan masyarakat mengetahui logika insentif dan konsekuensi fiskalnya, sehingga kebijakan investasi dapat diperdebatkan berdasarkan bukti.

Sumber daya alam memerlukan prinsip intergenerational justice. Pendapatan dari mineral, batu bara, minyak, gas, dan perkebunan berasal dari aset yang sebagian tidak terbarukan atau memiliki dampak ekologis besar. Keuntungan hari ini seharusnya ditransformasikan menjadi aset masa depan: pendidikan, kesehatan, riset, dana abadi, infrastruktur produktif, dan restorasi lingkungan. Tanpa mekanisme tersebut, daerah kaya sumber daya dapat mengalami enclave economy: nilai ekonomi tinggi berdampingan dengan kemampuan lokal yang rendah.

8. Fiskal, Anggaran, dan Distribusi Kewargaan Ekonomi

Anggaran adalah bentuk paling konkret dari kontrak sosial. Pajak memindahkan sumber daya dari warga dan perusahaan kepada negara; belanja mengembalikannya dalam bentuk layanan, transfer, investasi, keamanan, dan administrasi. Demokrasi ekonomi karena itu sangat terkait dengan siapa yang membayar dan siapa yang menerima. Sistem pajak yang terlalu bergantung pada konsumsi dapat relatif

membebani kelompok berpendapatan rendah, sementara loopholes dan tax avoidance mengurangi kontribusi pemilik aset besar. Reformasi administrasi pajak, beneficial ownership, dan integrasi data dapat memperbaiki keadilan tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif semata.

Di sisi belanja, kualitas lebih penting daripada nominal. Program perlindungan sosial yang tepat sasaran dapat mengurangi kerentanan, tetapi investasi pada pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, transportasi, dan konektivitas menentukan mobilitas jangka panjang. Demokrasi ekonomi yang matang tidak memandang bansos sebagai lawan pembangunan; bansos adalah shock absorber, sedangkan layanan publik membangun kapabilitas. Tantangannya adalah mencegah politisasi distribusi, memperbaiki data sosial, dan memastikan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Pengadaan pemerintah adalah jembatan antara anggaran dan pasar. Nilainya yang besar membuat pengadaan menjadi instrumen penting untuk mendorong UMKM, inovasi, green procurement, dan produk domestik. Tetapi pengadaan juga rentan collusion, spesifikasi yang diarahkan, dan vendor concentration. Open contracting, publikasi beneficial ownership vendor, red-flag analytics, dan penggunaan AI untuk deteksi anomali dapat memperkuat integritas. Teknologi tidak menggantikan pengawasan manusia, tetapi dapat meningkatkan probabilitas menemukan pola tidak wajar.

Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal. Namun kualitas institusi antar daerah tidak sama. Transfer pusat perlu mendorong outcome, bukan hanya kepatuhan input. Formula yang memberi insentif pada kualitas pendidikan, kesehatan, kemudahan usaha yang berintegritas, pengurangan stunting, dan kualitas lingkungan dapat memperluas demokrasi ekonomi. Masyarakat juga perlu melihat dashboard anggaran daerah yang mudah dipahami, bukan hanya dokumen teknis.

Utang publik dan kewajiban kontinjensi harus dibahas secara demokratis karena bebannya melintasi generasi. Utang bukan selalu masalah; ia rasional jika membiayai proyek dengan social return tinggi atau menstabilkan ekonomi saat krisis. Tetapi proyek yang tidak transparan dapat mengunci anggaran masa depan. Karena itu setiap mega-project membutuhkan stress test fiskal, skenario permintaan, analisis sensitivitas, serta publikasi asumsi. Demokrasi ekonomi menuntut bahwa optimisme pembangunan diuji oleh data, bukan hanya narasi.

9. UMKM, Koperasi, Pekerja, dan Demokrasi dari Bawah

Demokrasi ekonomi dari bawah berawal dari kemampuan rumah tangga dan usaha kecil membangun aset. UMKM menyerap tenaga kerja besar dan menjadi pintu masuk kewirausahaan, tetapi banyak berada pada produktivitas rendah, akses kredit terbatas, teknologi sederhana, dan pasar lokal. Kebijakan yang hanya menambah jumlah UMKM tanpa meningkatkan productivity ladder berisiko menjaga masyarakat dalam survival entrepreneurship. Agenda yang lebih kuat adalah menghubungkan UMKM ke rantai pasok perusahaan besar, standardisasi mutu, digital accounting, pembiayaan berbasis invoice, serta pengadaan publik.

Koperasi dapat menjadi instrumen demokratisasi kepemilikan jika dikelola dengan governance modern. Model koperasi pekerja, koperasi produsen, koperasi digital, dan koperasi energi memungkinkan anggota memiliki bagian dari surplus yang biasanya terkonsentrasi pada pemilik modal eksternal. Namun kelemahan historis berupa pengelolaan buruk, elite capture internal, dan ketergantungan bantuan harus

diatasi. Prinsip one member one vote hanya bernilai jika anggota memiliki informasi dan manajemen profesional.

Bagi pekerja, demokrasi ekonomi berarti hak untuk bernegosiasi, memperoleh keselamatan kerja, kepastian pembayaran, perlindungan sosial, dan kesempatan meningkatkan kompetensi. Perubahan teknologi akan menggeser jenis pekerjaan. Kebijakan upskilling yang efektif harus menghubungkan pelatihan dengan demand industri, bukan sekadar sertifikat. Perusahaan dapat diberi insentif untuk apprenticeship, sementara sistem pendidikan vokasi perlu mengukur outcome penempatan kerja dan kenaikan upah.

Generasi muda menghadapi tantangan berbeda: biaya rumah di kota besar, persaingan kerja, pekerjaan platform, dan ketidakpastian karier. Bila kelompok muda berpendidikan merasa pertumbuhan tidak memberi jalur mobilitas, ketidakpuasan dapat berubah menjadi sinisme politik. Demokrasi ekonomi perlu menyediakan visible pathways: kesempatan membeli rumah, modal awal, pendidikan tinggi terjangkau, transportasi efisien, dan pasar kerja meritokratis. Mobilitas sosial adalah sumber legitimasi demokrasi yang lebih dalam daripada pertumbuhan agregat.

Perempuan juga memerlukan perhatian khusus karena partisipasi ekonomi dipengaruhi beban care work, keamanan transportasi, akses pembiayaan, dan diskriminasi pasar kerja. Infrastruktur penitipan anak, cuti yang adil, kerja fleksibel yang tidak eksploitatif, serta akses formalisasi usaha dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kebebasan. Demokrasi ekonomi bukan redistribusi setelah pertumbuhan; ia adalah desain institusi yang memperluas siapa yang dapat menghasilkan pertumbuhan.

10. Digitalisasi, AI, Platform, dan Konsentrasi Baru

Digitalisasi mengubah sumber kekuasaan ekonomi. Data, komputasi, algoritma, dan efek jaringan memungkinkan platform tumbuh sangat cepat. Dalam banyak pasar digital, semakin banyak pengguna membuat layanan semakin bernilai, sehingga winner-takes-most menjadi mungkin. Ini menciptakan tantangan bagi kebijakan persaingan tradisional yang berfokus pada harga. Platform dapat memberikan layanan gratis tetapi memperoleh kekuasaan melalui data, ranking, dan akses pasar. Demokrasi ekonomi digital membutuhkan interoperabilitas, portability data, transparansi algoritmik dalam kasus berisiko tinggi, serta perlindungan konsumen.

AI memperbesar isu tersebut. Model AI membutuhkan data, talenta, chip, energi, dan cloud. Jika hanya beberapa perusahaan memiliki semua sumber daya, ketergantungan pelaku kecil meningkat. Indonesia perlu strategi yang tidak sekadar menjadi konsumen AI. Investasi pada compute bersama untuk universitas dan startup, open datasets yang aman, riset bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta pengadaan pemerintah untuk solusi lokal dapat memperluas ekosistem. Local AI juga relevan untuk sektor yang membutuhkan privasi dan kedaulatan data.

Pemerintah sendiri menjadi pemilik data sangat besar. Integrasi data dapat meningkatkan ketepatan bansos, pajak, kesehatan, dan perizinan. Namun konsolidasi data negara juga menciptakan risiko surveillance dan misuse. Prinsip purpose limitation, access logging, cybersecurity, audit independen, dan mekanisme koreksi data warga adalah pagar demokratis. Negara digital yang efektif harus sekaligus menjadi negara yang dapat diaudit.

Algoritma dalam kebijakan publik perlu memenuhi prinsip explainability yang proporsional. Tidak semua model harus sepenuhnya terbuka, tetapi warga yang terkena keputusan penting harus mengetahui dasar keputusan dan memiliki jalur banding. Ini terutama penting dalam kredit, asuransi, bansos, rekrutmen, pendidikan, dan penegakan hukum. Bias algoritmik dapat mengubah ketimpangan lama menjadi keputusan otomatis yang tampak objektif.

Ekonomi kreator dan gig work memberi fleksibilitas tetapi juga memindahkan risiko kepada individu. Pengemudi, kurir, freelancer, dan penjual platform sering bergantung pada rating dan algoritma yang tidak mereka kendalikan. Demokrasi ekonomi digital dapat memasukkan hak atas transparansi perubahan komisi, akses data performa, mekanisme keberatan terhadap deactivation, dan skema perlindungan sosial portabel. Dengan begitu inovasi dan perlindungan tidak dipertentangkan secara biner.

11. Daerah, Sumber Daya Alam, dan Demokrasi Ekonomi Teritorial

Demokrasi ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari geografi kepulauan. Biaya logistik, kualitas pelabuhan, jalan, internet, dan listrik menentukan apakah warga di daerah dapat terhubung dengan pasar nasional. Infrastruktur karena itu merupakan instrumen pemerataan kesempatan. Namun proyek infrastruktur perlu memperhitungkan siapa yang kehilangan tanah, siapa yang memperoleh kenaikan nilai lahan, dan bagaimana manfaat dibagi. Land value capture yang transparan dapat mengembalikan sebagian keuntungan pembangunan ke publik.

Daerah kaya sumber daya sering menghadapi dilema: penerimaan tinggi tetapi ekonomi lokal kurang terdiversifikasi. Kebijakan daerah perlu menggunakan pendapatan sumber daya untuk membangun human capital dan sektor non-ekstraktif. Dana abadi daerah, beasiswa STEM, pusat vokasi, dukungan pemasok lokal, dan infrastruktur digital dapat mengubah temporary resource rents menjadi permanent capabilities. Tanpa strategi itu, boom komoditas memperbesar ketergantungan.

Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki posisi penting dalam demokrasi ekonomi teritorial. Kepastian hak atas tanah dan mekanisme persetujuan yang bermakna mengurangi konflik serta memberi dasar bagi investasi yang legitimate. Partisipasi tidak boleh menjadi formalitas setelah keputusan dibuat. Informasi mengenai dampak ekonomi dan lingkungan harus tersedia sebelum konsultasi, dan mekanisme benefit-sharing perlu dapat diaudit.

Kota-kota menghadapi persoalan berbeda: harga rumah, kemacetan, segregasi, dan informalitas. Perumahan terjangkau dekat transportasi publik adalah kebijakan demokrasi ekonomi karena mengurangi spatial mismatch antara tempat tinggal dan pekerjaan. Jika pekerja berpendapatan rendah terdorong semakin jauh dari pusat kerja, biaya waktu dan transportasi menggerus upah. Urban policy karena itu bagian dari distribusi pendapatan nyata.

Desentralisasi juga memerlukan demokrasi lokal yang sehat. Dinasti politik, konsentrasi bisnis lokal, dan patronase dapat membatasi kompetisi. Transparansi APBD, e-procurement, keterbukaan perizinan, disclosure kepentingan pejabat, dan jurnalisme lokal berperan sebagai checks and balances. Pusat tidak dapat menggantikan seluruh pengawasan lokal; warga harus memiliki akses langsung pada data yang memengaruhi hidup mereka.

12. Skenario Masa Depan 2026-2045

Skenario pertama adalah negara pembangunan demokratis. Dalam skenario ini, pemerintah mempertahankan kapasitas koordinasi tinggi tetapi memperkuat transparansi, meritokrasi, persaingan usaha, dan pengawasan. Hilirisasi berkembang menjadi industrial deepening; UMKM menjadi pemasok; pendidikan vokasi membaik; kebijakan sosial lebih adaptif; dan digitalisasi meningkatkan layanan tanpa memperluas surveillance. Koalisi politik luas diimbangi parlemen yang lebih profesional dan lembaga audit yang kuat. Pertumbuhan berada pada kisaran yang cukup tinggi dengan mobilitas sosial meningkat. Ini adalah skenario paling sesuai dengan aspirasi Indonesia Emas 2045.

Skenario kedua adalah growth without voice. Pertumbuhan dan investasi tetap berjalan, tetapi keputusan semakin terpusat dan oposisi melemah. Mega-project mendominasi, sementara partisipasi publik menjadi prosedural. Selama pertumbuhan dan pekerjaan cukup, sistem memperoleh legitimasi. Risiko muncul ketika siklus komoditas berbalik atau utang proyek menekan fiskal. Karena koreksi institusional lemah, kesalahan kebijakan dapat bertahan terlalu lama. Kesenjangan antara indikator makro dan pengalaman rumah tangga dapat memicu ketidakpercayaan.

Skenario ketiga adalah oligarchic stagnation. Konsolidasi politik dan ekonomi berinteraksi sehingga pasar semakin sulit dimasuki pendatang baru. Inovasi melemah karena perusahaan lebih memilih hubungan politik daripada produktivitas. Kredit, izin, dan kontrak terkonsentrasi. Pertumbuhan melambat bukan karena kekurangan modal, tetapi karena misallocation. Dalam skenario ini demokrasi politik pun tertekan karena kelompok ekonomi dominan mampu membiayai pengaruh secara terus-menerus.

Skenario keempat adalah fragmented populism. Kekecewaan terhadap elite menghasilkan politik redistributif jangka pendek yang tidak disertai produktivitas. Pemerintah daerah dan pusat bersaing membagikan manfaat tanpa basis fiskal yang kuat, sementara kebijakan industri berubah-ubah. Investasi menurun karena ketidakpastian. Skenario ini menunjukkan bahwa kritik terhadap konsolidasi tidak boleh berakhir pada fragmentasi. Demokrasi yang efektif memerlukan kapasitas negara dan disiplin kebijakan.

Jalur aktual Indonesia kemungkinan merupakan kombinasi dan dapat berubah menurut kebijakan. Karena itu indikator early warning penting: konsentrasi pasar, kualitas rule of law, independensi pengawasan, share pengadaan kompetitif, jumlah bidder, tren upah riil, dinamika mobilitas sosial, konflik agraria, kebebasan akademik, konsentrasi media, serta kualitas kompetisi pemilu. Dashboard demokrasi ekonomi dapat membantu pemerintah, akademisi, dan masyarakat mendeteksi pergeseran sebelum menjadi krisis.

13. Agenda Reformasi: Membangun Negara Kuat yang Tetap Demokratis

Agenda pertama adalah reformasi pembiayaan politik. Pendanaan partai dari APBN/APBD dapat ditingkatkan secara bertahap dengan syarat audit ketat, demokrasi internal, transparansi donor, dan pelaporan digital yang dapat dicari publik. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada donor besar, bukan mensubsidi organisasi tanpa akuntabilitas. Batas pengeluaran kampanye perlu diawasi secara real time dan laporan donor harus terhubung dengan beneficial ownership untuk menghindari nominee.

Agenda kedua adalah arsitektur konflik kepentingan. Indonesia memerlukan definisi yang jelas tentang konflik aktual, potensial, dan perceived conflict; kewajiban recusal; disclosure kepentingan bisnis keluarga yang relevan; cooling-off period; dan register pertemuan lobi untuk sektor bernilai tinggi.

Penegakan tidak harus seluruhnya pidana. Sanksi administratif, pembatalan keputusan, dan reputational disclosure dapat efektif.

Agenda ketiga adalah competition state. KPPU dan regulator sektoral harus memiliki data, sumber daya, dan kewenangan yang memadai untuk mengawasi merger, abuse of dominance, dan kartel termasuk di pasar digital. Competition impact assessment perlu diterapkan pada kebijakan industri dan regulasi baru. Tujuan bukan melemahkan perusahaan nasional, melainkan memastikan perusahaan tumbuh karena produktivitas dan inovasi, bukan proteksi permanen.

Agenda keempat adalah open state. Kontrak publik, penerima insentif besar, beneficial ownership, data lingkungan, dan outcome proyek perlu dipublikasikan dengan format machine-readable kecuali ada alasan keamanan yang sah. Keterbukaan memungkinkan universitas, jurnalis, dan masyarakat membuat analisis independen. Transparansi sendiri tidak cukup, tetapi tanpa transparansi pengawasan menjadi mahal.

Agenda kelima adalah reformasi BUMN yang memisahkan mandat komersial dan pelayanan publik. Penugasan harus memiliki kompensasi, target, dan evaluasi. Direksi dan komisaris perlu proses yang menekankan kompetensi dan integritas. Risiko fiskal perusahaan negara harus dimasukkan dalam analisis anggaran. BUMN dapat menjadi motor pembangunan tanpa menjadi substitusi untuk pasar atau instrumen patronase.

Agenda keenam adalah social investment. Belanja pendidikan, kesehatan, nutrisi, perumahan, transportasi, dan reskilling harus dilihat sebagai investasi produktivitas. Fokus perlu bergeser ke outcome: learning gains, employability, wage progression, health-adjusted productivity, dan mobility. Program sosial yang lebih adaptif dapat mengurangi risiko rumah tangga mengambil keputusan jangka pendek yang merusak masa depan, seperti putus sekolah atau menjual aset produktif.

Agenda ketujuh adalah demokratisasi aset. Reforma agraria, sertifikasi yang berkualitas, perumahan, saham pekerja, koperasi produktif, dana pensiun, dan financial inclusion dapat memperluas kepemilikan. Pendapatan penting, tetapi aset menciptakan resilience dan bargaining power. Kebijakan harus menghindari sertifikasi tanpa penyelesaian konflik atau kredit tanpa perlindungan konsumen.

Agenda kedelapan adalah just transition. Transisi energi dan dekarbonisasi akan menciptakan sektor baru sekaligus menekan wilayah bergantung pada batu bara atau industri intensif karbon. Dana transisi, retraining, diversifikasi daerah, dan partisipasi pekerja diperlukan agar biaya tidak ditanggung kelompok yang paling lemah. Demokrasi ekonomi berarti perubahan struktural dirancang bersama mereka yang terdampak.

Agenda kesembilan adalah integritas digital. Pemerintah perlu AI governance, data protection enforcement, cybersecurity, dan algorithmic accountability. Penggunaan AI untuk pelayanan publik harus memiliki human oversight dan jalur banding. Pada saat sama, pemerintah dapat memperluas akses compute untuk riset dan UMKM agar produktivitas AI tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

Agenda kesepuluh adalah penguatan masyarakat sipil, media, dan universitas. Kritik berbasis bukti adalah bagian dari kapasitas negara karena membantu mendeteksi kesalahan. Pemerintah yang percaya diri tidak perlu menyamakan kritik dengan permusuhan. Universitas perlu kebebasan akademik untuk menilai kebijakan, sementara lembaga pemerintah perlu budaya evidence-based policy yang membuka data bagi evaluasi independen.

14. Implikasi bagi Manajemen dan Pendidikan Tinggi

Bagi ilmu manajemen, konsolidasi kekuasaan bukan hanya isu politik. Ia memengaruhi corporate governance, strategy, risk management, compliance, dan stakeholder management. Perusahaan yang terlalu bergantung pada political connection menghadapi key-person risk dan regulatory reversal ketika kekuasaan berubah. Strategi jangka panjang yang sehat lebih baik dibangun pada produktivitas, inovasi, reputasi, dan kemampuan memenuhi standar daripada hubungan personal. Dengan demikian demokrasi ekonomi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih predictable.

Balanced Scorecard dapat diperluas untuk organisasi publik dengan memasukkan dimensi legitimacy dan inclusion. Selain keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran, pemerintah dapat mengukur akses warga, distribusi manfaat, kepuasan pengaduan, kualitas partisipasi, dan integritas. KPI yang hanya mengejar nilai investasi dapat menghasilkan perilaku berbeda dari KPI yang juga menilai local supplier development dan environmental compliance.

Risk management sektor publik perlu memasukkan capture risk. Dalam proyek besar, risk register biasanya memuat biaya, jadwal, teknis, lingkungan, dan pembiayaan. Namun risiko konflik kepentingan, vendor concentration, regulatory favoritism, dan political interference juga harus dinilai. Audit internal perlu menggunakan data lintas proyek untuk melihat pola, bukan hanya memeriksa dokumen satu per satu.

Pendidikan tinggi manajemen perlu mengajarkan bahwa efisiensi dan etika tidak terpisah. Mahasiswa MBA atau S2/S3 yang kelak menjadi pemimpin perusahaan dan birokrasi perlu memahami bahwa governance mengurangi cost of capital, meningkatkan trust, dan memperpanjang horizon investasi. Studi kasus Indonesia dapat membahas hilirisasi, BUMN, pengadaan, platform digital, koperasi, dan pembangunan daerah sebagai masalah strategic management sekaligus public value.

AI dapat dipakai sebagai alat pembelajaran demokrasi ekonomi. Mahasiswa dapat menganalisis APBD, laporan tahunan BUMN, struktur pasar, atau data kemiskinan dengan bantuan AI, tetapi harus memeriksa sumber, bias, dan asumsi. Kompetensi utama bukan sekadar prompt engineering, melainkan kemampuan merumuskan pertanyaan, membedakan korelasi dan sebab, serta menilai trade-off. Dalam era AI, critical thinking menjadi bagian dari civic capacity.

15. Kesimpulan

Konsolidasi kekuasaan adalah fenomena ambivalen. Indonesia membutuhkan negara yang mampu merencanakan, membangun, mengatur, dan menegakkan keputusan. Fragmentasi berlebihan dapat menghambat industrialisasi dan pelayanan publik. Namun kapasitas tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi dominasi. Masa depan demokrasi ekonomi karena itu bukan pilihan antara negara kuat atau demokrasi, melainkan proyek membangun negara kuat yang dikendalikan oleh rule of law, transparansi, kompetisi, partisipasi, dan hak warga.

Capaian ekonomi 2025-2026 memberi modal optimisme. Pertumbuhan tetap di atas lima persen, kemiskinan turun, dan pengangguran terbuka menurun. Tetapi meningkatnya Gini dari September 2025 ke Maret 2026 serta persoalan kualitas kerja menunjukkan bahwa fase berikutnya harus berorientasi pada distribusi kapabilitas. Indonesia tidak cukup menjadi negara yang lebih kaya; ia perlu menjadi masyarakat di mana lebih banyak warga memiliki aset, keterampilan, suara, dan kesempatan untuk naik kelas.

Literatur demokrasi Indonesia memberi peringatan bahwa kompetisi elektoral dapat bertahan bersamaan dengan illiberalism dan oligarchisation. Karena itu pemilu tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran demokrasi. Sama halnya, PDB tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran ekonomi. Demokrasi ekonomi lahir pada pertemuan keduanya: political voice dan economic agency. Warga harus mampu memilih pemerintah, tetapi juga mampu memilih pekerjaan, membangun usaha, menolak eksploitasi, memperoleh informasi, dan mengakses keadilan.

Indonesia Emas 2045 akan lebih kokoh jika pertumbuhan dibangun melalui institusi yang dapat bertahan melewati pergantian pemimpin. Institusi seperti persaingan usaha, pengadaan terbuka, BUMN profesional, pajak yang adil, peradilan yang kredibel, media plural, universitas merdeka, dan perlindungan sosial adaptif tidak selalu menghasilkan headline besar, tetapi menentukan kualitas pembangunan. Kekuatan negara yang diikat oleh institusi adalah kapasitas; kekuatan negara yang bergantung pada jaringan personal adalah kerentanan.

Dengan demikian, pertanyaan 'siapa yang berkuasa?' perlu dilengkapi dengan 'bagaimana kekuasaan dibatasi?', 'siapa yang memperoleh manfaat?', dan 'apakah warga biasa dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri?'. Demokrasi ekonomi Indonesia akan bertahan bukan karena konflik kepentingan hilang, tetapi karena institusi membuat konflik itu terlihat dan dapat dinegosiasikan secara adil. Itulah fondasi bagi pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi legitimate, resilient, dan bermartabat.

Lampiran Analitis: Dua Puluh Proposisi untuk Demokrasi Ekonomi Indonesia

Proposisi 1. Pertumbuhan dan legitimasi

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan legitimasi pemerintah jika manfaatnya terasa luas, tetapi legitimasi berbasis kinerja bersifat kondisional. Ketika pertumbuhan melambat, masyarakat akan lebih sensitif terhadap fairness prosedural. Karena itu rule of law bukan kemewahan yang bisa ditunda sampai negara kaya; ia merupakan insurance institution ketika kondisi ekonomi memburuk. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 2. Konsentrasi aset dan konsentrasi suara

Konsentrasi kekayaan dapat diterjemahkan menjadi pengaruh melalui pembiayaan, media, lobi, dan jaringan profesional. Kebijakan redistribusi pendapatan tanpa reformasi akses politik hanya menyentuh gejala. Sebaliknya, reformasi politik tanpa perluasan kepemilikan aset membuat ketimpangan pengaruh kembali muncul. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 3. Biaya politik sebagai biaya ekonomi

Biaya kampanye yang tinggi akhirnya dapat berubah menjadi biaya ekonomi melalui pencarian rente, kontrak yang tidak efisien, atau regulasi protektif. Dengan demikian reformasi pemilu memiliki return ekonomi yang dapat dihitung dalam bentuk efisiensi pengadaan dan kualitas regulasi. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 4. Koalisi besar dan information loss

Koalisi yang sangat luas dapat mempercepat keputusan tetapi mengurangi informasi tentang alternatif kebijakan karena kritik internal tersaring. Oposisi dan hearing publik berfungsi sebagai mekanisme discovery, bukan sekadar pertarungan kekuasaan. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 5. BUMN dan dual accountability

BUMN harus bertanggung jawab sebagai korporasi dan instrumen publik. Tanpa pemisahan mandat, kegagalan komersial dapat dibenarkan sebagai penugasan dan kegagalan pelayanan dapat dibenarkan sebagai tuntutan profit. Akuntabilitas ganda perlu diterjemahkan ke kontrak kinerja yang eksplisit. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 6. Hilirisasi dan distribusi nilai tambah

Nilai tambah nasional seharusnya diukur sepanjang rantai: laba, pajak, upah, teknologi, pemasok, dan externalities. Ekspor yang lebih tinggi dapat menyembunyikan repatriasi laba atau biaya lingkungan bila dashboard terlalu sempit. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 7. Pasar kompetitif dan perusahaan nasional

Membangun champion nasional tidak harus berarti memberi proteksi tanpa batas. Champion yang disiplin oleh kompetisi domestik dan global cenderung lebih inovatif daripada perusahaan yang bergantung pada regulasi. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan

lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 8. Pekerjaan layak sebagai institusi demokrasi

Pendapatan stabil memberi warga waktu dan keamanan untuk berpartisipasi. Ketidakpastian ekstrem meningkatkan ketergantungan pada patron. Karena itu formalization dan social protection memiliki efek politik selain efek ekonomi. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 9. UMKM dan naik kelas

Ukuran jumlah UMKM dapat menyesatkan bila sebagian besar tetap mikro sepanjang hidup. Indikator utama harus mencakup graduation: peningkatan omzet, pekerja, produktivitas, ekspor, dan teknologi. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 10. Koperasi dan distribusi surplus

Koperasi menawarkan demokratisasi kepemilikan tetapi hanya jika tata kelola mencegah elite internal. Digital ledger, audit anggota, dan profesionalisasi dapat memperbarui relevansi koperasi. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 11. Data sebagai infrastruktur publik

Data berkualitas adalah public infrastructure. Keterbukaan data anggaran, kontrak, pasar kerja, dan lingkungan memungkinkan masyarakat mengawasi serta perusahaan mengambil keputusan lebih baik. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 12. AI dan asymmetric intelligence

AI dapat memperlebar kesenjangan informasi antara organisasi besar dan warga. Public-interest AI seperti asisten hukum, pendidikan, kesehatan, dan analisis anggaran dapat mengimbangnya jika akses

merata. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 13. Desentralisasi dan variasi institusi

Otonomi memungkinkan inovasi, tetapi juga menghasilkan kualitas governance yang sangat berbeda. Benchmarking antar daerah dan transfer berbasis outcome dapat menyebarkan praktik baik. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 14. Keadilan antargenerasi

Utang, ekstraksi SDA, dan perubahan iklim memindahkan biaya ke generasi muda. Setiap keputusan besar perlu memiliki generational impact statement yang sederhana namun transparan. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 15. Kebebasan akademik dan kualitas kebijakan

Universitas yang bebas mengkritik membantu negara mengurangi blind spot. Hubungan pemerintah-universitas yang sehat tidak mensyaratkan kesepakatan, melainkan penggunaan metode dan bukti. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 16. Media plural dan harga informasi

Jika informasi politik didominasi sedikit kelompok, biaya memperoleh perspektif alternatif meningkat. Kompetisi media dan transparansi kepemilikan menurunkan information cost bagi warga. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 17. Rule of law dan cost of capital

Kepastian kontrak dan peradilan yang independen menurunkan risiko. Dengan demikian rule of law mendukung investasi, bukan sekadar membatasi pemerintah. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 18. Perlindungan sosial dan kewirausahaan

Jaring pengaman dapat meningkatkan risk-taking produktif karena warga berani berpindah kerja atau membuka usaha ketika risiko dasar ditanggung bersama. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 19. Partisipasi dan kualitas proyek

Konsultasi yang dilakukan dini dapat memperbaiki desain proyek karena masyarakat memiliki local knowledge. Partisipasi bukan hanya hak normatif tetapi sumber informasi manajerial. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Proposisi 20. Demokrasi ekonomi sebagai resilience

Ekonomi yang mendistribusikan aset, keterampilan, dan kesempatan lebih tahan terhadap krisis karena penyesuaian tidak bergantung pada segelintir aktor. Resilience sosial dan ekonomi bertemu dalam institusi inklusif. Dalam praktik Indonesia, proposisi ini perlu diuji dengan data lintas waktu dan lintas daerah agar diskusi tidak berhenti pada generalisasi normatif. Evaluasi kebijakan sebaiknya membandingkan outcome sebelum dan sesudah intervensi, menggunakan kelompok pembanding bila memungkinkan, serta membuka metodologi kepada publik. Dengan cara itu demokrasi ekonomi berkembang sebagai agenda empiris dan dapat dipelajari, bukan hanya slogan konstitusional.

Sepuluh Kasus Hipotetis untuk Diskusi Manajemen dan Kebijakan

Kasus 1. Kawasan industri mineral

Sebuah provinsi menerima investasi smelter bernilai besar. PDB daerah melonjak, tetapi pemasok lokal hanya memperoleh bagian kecil dan kebutuhan tenaga ahli diisi pekerja dari luar. Pemerintah daerah kemudian membuat program supplier development, vokasi bersama industri, transparansi royalti, dan

dana restorasi. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi membutuhkan deliberate linkage policy agar angka investasi berubah menjadi kapabilitas lokal. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 2. Pengadaan digital pemerintah

Sistem e-procurement mempercepat tender tetapi data menunjukkan tiga vendor memenangkan mayoritas paket. Pemerintah menerapkan beneficial ownership screening, memecah paket agar UMKM mampu masuk, dan membuat dashboard bidder concentration. Efisiensi administratif berubah menjadi contestability pasar. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 3. BUMN infrastruktur

BUMN menerima penugasan proyek yang social return-nya tinggi tetapi financial return rendah. Tanpa kompensasi, neraca perusahaan memburuk. Pemerintah kemudian memisahkan PSO, memberi availability payment berbasis kinerja, dan melakukan audit manfaat. Kasus ini memperlihatkan pentingnya memisahkan tujuan publik dan komersial. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 4. Platform transportasi

Perubahan algoritma menurunkan pendapatan pengemudi tanpa pemberitahuan jelas. Regulator mewajibkan notice period, transparansi komisi, portabilitas rating, dan forum perwakilan pengemudi. Inovasi tetap berjalan sementara bargaining power pekerja meningkat. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 5. Perumahan perkotaan

Transit baru menaikkan harga tanah di sekitar stasiun sehingga pekerja berpendapatan menengah-bawah terdorong ke pinggiran. Kota menerapkan inclusionary zoning dan land value capture untuk membiayai rumah terjangkau. Infrastruktur lalu menjadi alat inklusi, bukan gentrifikasi semata. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain

governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 6. Kredit UMKM berbasis AI

Bank menggunakan AI untuk menilai usaha mikro tetapi model bias terhadap usaha tanpa riwayat digital. Regulator meminta audit fairness, alternative data yang terverifikasi, dan human review. Teknologi digunakan untuk memperluas akses tanpa mengabadikan exclusion. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 7. Dana desa

Desa menerima dana besar tetapi keputusan dikuasai beberapa keluarga. Portal anggaran desa, musyawarah dengan voting terbuka, dan audit sosial memperluas partisipasi. Demokrasi ekonomi lokal membutuhkan informasi yang mudah dipahami, bukan hanya kepatuhan dokumen. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 8. Transisi batu bara

Kabupaten penghasil batu bara menghadapi penurunan permintaan. Dana transisi digunakan untuk pelatihan teknisi energi, agroprocessing, dan logistik. Pekerja dilibatkan dalam perencanaan. Just transition mencegah biaya dekarbonisasi berubah menjadi backlash politik. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 9. Universitas dan kebijakan publik

Sebuah universitas menemukan proyek daerah memiliki cost overrun. Alih-alih menekan peneliti, pemerintah membuka data dan membentuk review independen. Kritik menghasilkan redesign kontrak. Kasus ini menunjukkan kebebasan akademik dapat meningkatkan kapasitas negara. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Kasus 10. Kampanye dan donor

Seorang kandidat menerima dukungan besar dari kelompok bisnis yang kemudian mengikuti tender setelah pemilu. Sistem disclosure real time memungkinkan publik dan auditor mengidentifikasi konflik potensial; pejabat diwajibkan recusal. Pembiayaan politik menjadi bagian dari preventive governance. Bagi mahasiswa manajemen, pertanyaan kuncinya adalah: indikator apa yang perlu dipakai; siapa

stakeholder yang memiliki power, legitimacy, dan urgency; di titik mana konflik kepentingan muncul; serta desain governance apa yang mampu mempertahankan kecepatan keputusan tanpa mengorbankan fairness. Pendekatan ini menghubungkan strategic management dengan public value dan institutional analysis.

Pengembangan Analisis Lanjutan: Dimensi-Dimensi Kritis Demokrasi Ekonomi

1. Demokrasi ekonomi dan problem representasi kelas

Salah satu pertanyaan yang jarang diajukan dalam evaluasi demokrasi adalah sejauh mana lembaga perwakilan mencerminkan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Representasi tidak harus berarti setiap profesi memperoleh kursi secara proporsional, tetapi komposisi sosial elite memengaruhi pengalaman yang mereka bawa ke dalam pembuatan kebijakan. Ketika politik semakin mahal, kandidat dengan akses terhadap kekayaan, jaringan bisnis, atau sponsor memiliki keunggulan dibanding pekerja, akademisi muda, aktivis lokal, atau pengusaha kecil. Akibatnya, agenda yang terlihat rasional bagi elite dapat berbeda dari kebutuhan rumah tangga median. Persoalan ini tidak diselesaikan dengan membatasi pengusaha memasuki politik, karena demokrasi terbuka bagi semua warga. Solusinya adalah menurunkan entry cost politik melalui pendanaan partai yang lebih sehat, proses kandidasi internal yang transparan, dukungan administratif bagi kandidat, serta pembatasan dan disclosure belanja kampanye. Dalam jangka panjang, partai perlu kembali menjadi organisasi kader dan agregator kepentingan, bukan semata kendaraan elektoral. Dari sisi demokrasi ekonomi, kualitas representasi dapat diuji dengan membandingkan preferensi kebijakan warga lintas kelas dengan pola legislasi, prioritas anggaran, dan keputusan regulasi. Jika terdapat deviasi yang konsisten ke arah kepentingan kelompok berdaya tinggi, maka masalahnya bukan hanya persepsi ketidakadilan, melainkan representational inequality. Indonesia membutuhkan penelitian yang lebih rutin mengenai siapa yang diwakili, siapa yang memiliki akses terhadap hearing, dan kelompok mana yang paling sering berhasil mengubah preferensinya menjadi kebijakan.

2. Politik biaya tinggi dan lingkaran rente

Politik biaya tinggi menciptakan lingkaran yang dapat menghubungkan proses demokratis dengan pencarian rente. Kandidat membutuhkan pembiayaan untuk kampanye; pembiayaan datang dari kekayaan pribadi, donor, atau jaringan usaha; setelah terpilih, muncul insentif untuk memulihkan biaya atau membalas dukungan; kebijakan, izin, dan kontrak kemudian menjadi sumber nilai ekonomi; sebagian nilai tersebut kembali membiayai kompetisi berikutnya. Lingkaran ini tidak harus selalu mengambil bentuk korupsi pidana. Ia dapat berlangsung melalui penunjukan yang legal, prioritas proyek, pembentukan regulasi, atau akses informasi lebih awal. Inilah sebabnya reformasi antikorupsi tidak dapat bergantung hanya pada penindakan setelah transaksi terjadi. Sistem harus mengurangi opportunity structure sejak awal. Disclosure donor secara digital, audit kampanye berbasis risiko, integrasi data donor dengan vendor pemerintah, dan kewajiban pejabat untuk mengumumkan konflik kepentingan merupakan instrumen preventif. Dari perspektif manajemen, biaya politik yang tidak transparan sama dengan off-balance-sheet liability: kewajiban nyata tetapi tidak tercatat dalam dokumen formal. Organisasi yang sehat mengidentifikasi liability semacam itu sebelum berubah menjadi krisis. Negara demokratis pun perlu melakukan hal yang sama. Jika biaya kompetisi politik dapat diturunkan dan sumber

pendanaan diperluas, insentif untuk mengubah jabatan publik menjadi aset pengembalian investasi akan berkurang.

3. Koalisi dominan dan kualitas deliberasi

Koalisi politik yang besar memiliki dua wajah. Ia dapat menciptakan stabilitas, mempermudah koordinasi lintas kementerian, dan mengurangi deadlock. Dalam negara yang menghadapi agenda pembangunan kompleks, kemampuan membuat keputusan adalah aset. Namun, bila sebagian besar kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan, arena deliberasi formal dapat kehilangan ketajaman. RUU, anggaran, penugasan BUMN, atau proyek strategis mungkin disahkan lebih cepat tetapi menerima lebih sedikit stress test politik. Demokrasi tidak menuntut bahwa setiap kebijakan harus diperlambat; demokrasi menuntut adanya mekanisme yang memaksa pengambil keputusan menjelaskan asumsi, biaya, risiko, dan alternatif. Bila oposisi parlementer kecil, fungsi tersebut perlu diperkuat melalui komite ahli independen, public hearing yang substantif, regulatory impact assessment, audit ex ante, serta kewajiban pemerintah menanggapi kritik secara tertulis. Universitas dan organisasi profesi juga dapat menjadi external deliberative institutions. Dengan desain demikian, stabilitas koalisi tidak harus mengorbankan kualitas keputusan. Tantangan terbesar adalah mengubah budaya politik dari pandangan bahwa kritik menghambat pembangunan menjadi pemahaman bahwa kritik berbasis bukti merupakan bagian dari quality assurance.

4. Rule of law sebagai infrastruktur ekonomi

Rule of law sering dibahas dalam bahasa hak dan demokrasi, tetapi bagi ekonomi ia berfungsi sebagai infrastruktur yang mengurangi ketidakpastian. Investor, UMKM, pekerja, dan konsumen membuat keputusan berdasarkan ekspektasi bahwa kontrak dihormati, izin tidak berubah secara arbitrer, sengketa dapat diselesaikan, dan pelanggaran memperoleh konsekuensi yang sebanding. Bila enforcement bergantung pada kedekatan, pelaku ekonomi akan mengalihkan investasi dari produktivitas menuju relationship management. Akibatnya, political connection menjadi aset yang lebih berharga daripada inovasi. Situasi ini merugikan perusahaan yang efisien namun tidak memiliki akses. Demokrasi ekonomi karena itu membutuhkan pengadilan komersial yang kredibel, regulasi yang konsisten, pelayanan perizinan berbasis aturan, dan mekanisme banding yang dapat diakses. Kepastian hukum tidak berarti kebijakan tidak boleh berubah; perubahan justru bagian dari pemerintahan. Yang penting adalah proses perubahan dapat diprediksi, memiliki masa transisi, dan tidak ditujukan secara selektif kepada pihak tertentu. Dalam bahasa strategi, rule of law menurunkan non-market risk dan cost of capital. Dengan demikian, memperkuat hukum bukan agenda yang berlawanan dengan pertumbuhan, melainkan prasyarat untuk pertumbuhan yang lebih kompetitif.

5. Demokrasi ekonomi dan mobilitas sosial

Ukuran paling intuitif dari demokrasi ekonomi adalah apakah seseorang yang lahir di rumah tangga berpendapatan rendah memiliki peluang realistis untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, dan aset di masa dewasa. Ketika mobilitas sosial tinggi, ketimpangan pada satu titik waktu dapat dipersepsikan lebih dapat diterima karena masyarakat melihat jalur naik kelas. Sebaliknya, jika posisi sosial diwariskan melalui akses sekolah, koneksi, lokasi, dan kepemilikan aset, demokrasi formal beroperasi di atas struktur kesempatan yang tertutup. Indonesia perlu mengembangkan pengukuran mobilitas antargenerasi yang lebih rutin, termasuk korelasi pendidikan dan pendapatan orang tua-anak,

perbedaan kualitas sekolah, serta akses pekerjaan pertama. Kebijakan yang meningkatkan mobilitas mencakup gizi sejak dini, pendidikan dasar yang setara, beasiswa, transportasi publik, perumahan dekat pusat kerja, magang berkualitas, dan rekrutmen meritokratis. Dari perspektif politik, mobilitas sosial juga mengurangi ketergantungan pada patron karena warga memiliki lebih banyak opsi. Oleh sebab itu agenda pemerataan tidak semata-mata transfer pendapatan, tetapi penciptaan tangga mobilitas yang dapat dinaiki.

6. Ketimpangan kekayaan yang tidak tertangkap Gini pengeluaran

Gini Ratio BPS sangat berguna untuk memantau distribusi pengeluaran, tetapi demokrasi ekonomi juga dipengaruhi ketimpangan kekayaan. Kepemilikan tanah, rumah, saham, bisnis, dan aset finansial menentukan kemampuan rumah tangga menanggung risiko dan memperoleh pendapatan pasif. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan serupa dapat memiliki keamanan ekonomi yang sangat berbeda jika satu memiliki rumah tanpa utang dan yang lain menyewa. Ketimpangan kekayaan juga memiliki dimensi politik karena aset dapat digunakan untuk membiayai pengaruh. Indonesia memerlukan statistik kekayaan rumah tangga yang lebih baik, termasuk distribusi aset dan utang. Pajak properti, capital gains, warisan, dan instrumen lain perlu dianalisis secara hati-hati berdasarkan administrability dan dampaknya pada investasi. Tujuannya bukan menghukum keberhasilan, tetapi memastikan sistem fiskal tidak secara tidak sengaja mempercepat konsentrasi lintas generasi. Program kepemilikan rumah, tabungan pensiun, saham pekerja, dan koperasi dapat menjadi strategi asset-building bagi kelas menengah dan pekerja.

7. Kelas menengah sebagai penyangga demokrasi ekonomi

Kelas menengah sering dipandang sebagai penyangga demokrasi karena memiliki pendidikan, aspirasi, dan sumber daya untuk menuntut akuntabilitas. Namun kelas menengah juga dapat merasa rapuh ketika biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan meningkat lebih cepat dari pendapatan. Kondisi ini menciptakan middle-class squeeze. Jika kelas menengah merasa membayar pajak tetapi layanan publik tidak sepadan, kepercayaan terhadap institusi menurun. Jika mereka khawatir jatuh miskin karena satu guncangan, preferensi politik dapat bergeser menuju solusi jangka pendek. Kebijakan demokrasi ekonomi karena itu perlu memperhatikan bukan hanya kelompok miskin, tetapi juga kelompok rentan dan aspiring middle class. Transportasi publik, asuransi kesehatan yang andal, sekolah publik berkualitas, perumahan, dan sistem pensiun merupakan social wage yang meningkatkan keamanan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan upah nominal. Negara kesejahteraan yang efisien memperkuat kelas menengah sekaligus produktivitas.

8. Persaingan usaha sebagai demokratisasi pasar

Persaingan usaha adalah bentuk demokratisasi dalam arena ekonomi karena memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk menantang incumbent. Tanpa contestability, perusahaan dominan dapat menentukan harga, syarat pemasok, akses distribusi, atau data. Konsentrasi tidak selalu buruk; skala ekonomi dibutuhkan di industri tertentu. Namun regulator perlu membedakan efisiensi yang lahir dari skala dan dominasi yang dipertahankan melalui hambatan buatan. KPPU, OJK, BI, Komdigi, dan regulator sektoral memiliki peran berbeda tetapi perlu koordinasi ketika batas industri menjadi kabur. Ekonomi digital misalnya mempertemukan pembayaran, perdagangan, iklan, logistik, dan data. Merger review harus memperhatikan potensi future competition, bukan hanya pangsa pasar saat ini. Bagi UMKM,

kebijakan persaingan dapat lebih penting daripada subsidi karena membuka akses ke platform, pemasok, dan pasar.

9. BUMN sebagai agen pembangunan dan risiko governance

BUMN dapat mengatasi kegagalan pasar ketika investasi swasta enggan masuk karena horizon panjang atau externalities besar. Ia juga dapat menyediakan layanan strategis dan menjadi anchor industrial policy. Namun konsentrasi aset dan mandat pada BUMN menciptakan risiko jika governance lemah. Perusahaan dapat menerima penugasan tanpa kompensasi yang memadai, mengambil utang untuk proyek dengan return tidak jelas, atau menjadi arena penempatan politik. Reformasi tidak harus berarti privatisasi; esensinya adalah accountability architecture. Setiap BUMN perlu memiliki mandate map: mana tujuan komersial, mana public service obligation, mana strategic mission. KPI harus sesuai dengan mandat. Jika pemerintah meminta layanan non-komersial, biaya dan manfaatnya harus dihitung serta muncul dalam anggaran. Dengan cara itu publik dapat menilai apakah subsidi kepada BUMN benar-benar membeli layanan publik atau menutup inefisiensi.

10. Kebijakan industri dan risiko favoritisme

Industrial policy kembali diterima secara global karena negara-negara bersaing pada semikonduktor, energi bersih, baterai, dan teknologi strategis. Indonesia memiliki alasan kuat untuk melakukan intervensi karena struktur ekonomi berbasis komoditas dan kebutuhan naik kelas. Tetapi industrial policy yang efektif berbeda dari favoritisme. Dukungan perlu diberikan berdasarkan kriteria, target, dan sunset clause. Pemerintah dapat menawarkan tax holiday atau fasilitas lahan, tetapi perusahaan penerima harus menunjukkan investasi nyata, transfer teknologi, pelatihan pekerja, dan outcome ekspor. Evaluasi berkala harus memungkinkan penghentian insentif. Tanpa disiplin tersebut, kebijakan industri berubah menjadi distribusi rente. Demokrasi ekonomi menambahkan satu syarat lagi: masyarakat perlu mengetahui biaya fiskal dari insentif dan siapa penerimanya.

11. Hilirisasi dan local linkage

Hilirisasi mencapai tujuan nasional bila menciptakan linkage ke ekonomi domestik. Smelter atau pabrik besar yang mengimpor sebagian besar input dan mempekerjakan sedikit tenaga lokal terampil dapat meningkatkan ekspor tetapi menciptakan enclave. Pemerintah perlu memetakan input-output untuk setiap klaster industri dan mengidentifikasi bagian rantai nilai yang realistis dimasuki perusahaan lokal. Program supplier development harus menggabungkan standar mutu, pembiayaan, teknologi, dan kontrak jangka menengah. Universitas daerah dapat menjadi penyedia riset terapan. Dengan demikian hilirisasi menjadi proses learning, bukan hanya processing. Ukuran keberhasilan perlu mencakup jumlah pemasok lokal yang naik kelas, produktivitas pekerja, paten atau desain, serta kemampuan perusahaan Indonesia memasuki pasar ekspor.

12. Sumber daya alam dan kontrak sosial daerah

Daerah penghasil sumber daya menanggung dampak langsung berupa perubahan penggunaan lahan, arus migrasi, tekanan infrastruktur, dan risiko lingkungan. Karena itu demokrasi ekonomi menuntut kontrak sosial yang jelas antara perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Revenue-sharing perlu transparan, tetapi uang saja tidak cukup. Masyarakat perlu memiliki akses terhadap data kualitas air, udara, reklamasi, dan penerimaan. Community development sebaiknya tidak

berupa filantropi ad hoc yang bergantung pada goodwill perusahaan, melainkan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Mekanisme grievance yang independen dapat mengurangi konflik. Bila warga melihat hubungan yang jelas antara ekstraksi dan peningkatan kualitas layanan, legitimacy proyek meningkat.

13. Reforma agraria dan kepastian hak

Tanah adalah aset produktif sekaligus sumber identitas dan konflik. Demokrasi ekonomi memerlukan kepastian hak bagi petani, masyarakat adat, perusahaan, dan negara. Sertifikasi dapat meningkatkan kepastian tetapi tidak menyelesaikan konflik tumpang tindih jika peta dan riwayat klaim tidak jelas. Reforma agraria perlu menggabungkan legal recognition, penyelesaian konflik, akses pembiayaan, penyuluhan, dan pasar. Membagikan tanah tanpa dukungan produktivitas dapat menghasilkan penjualan kembali dan reconcentration. Sebaliknya, konsesi skala besar tanpa partisipasi dapat menciptakan dispossession. Tata ruang digital dan one map policy harus disertai prosedur koreksi ketika data formal bertentangan dengan realitas sosial.

14. Kebijakan fiskal dan progressivity

Demokrasi ekonomi membutuhkan sistem fiskal yang membiayai barang publik sekaligus dirasakan adil. Keadilan tidak berarti setiap orang membayar jumlah sama, tetapi kontribusi disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat. Basis pajak yang luas mengurangi kebutuhan tarif ekstrem. Administrasi digital dapat meningkatkan compliance, tetapi harus menjaga privasi dan menyediakan mekanisme sengketa. Di sisi belanja, progresivitas perlu dihitung berdasarkan manfaat layanan, bukan hanya transfer tunai. Subsidi energi misalnya dapat tampak pro-rakyat tetapi sebagian besar manfaat nominal mungkin dinikmati rumah tangga dengan konsumsi lebih tinggi. Analisis incidence membantu pemerintah memilih instrumen yang lebih tepat.

15. Perlindungan sosial adaptif

Indonesia telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, tetapi tantangan berikutnya adalah adaptivitas. Rumah tangga dapat jatuh rentan karena PHK, pandemi, bencana, atau kenaikan harga. Sistem yang hanya memperbarui daftar penerima secara periodik dapat terlambat. Integrasi data, self-registration, verifikasi cepat, dan interoperability dapat membuat bantuan merespons guncangan. Namun otomatisasi juga menimbulkan risiko exclusion error. Karena itu setiap keputusan digital harus memiliki jalur pengaduan manusia. Perlindungan sosial adaptif memperkuat demokrasi ekonomi karena mengurangi ketergantungan warga pada bantuan patronal ketika krisis.

16. Upah, produktivitas, dan bargaining power

Perdebatan upah sering terjebak antara kepentingan pekerja dan daya saing perusahaan. Dalam jangka panjang, kenaikan upah yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas. Namun produktivitas tidak otomatis diterjemahkan menjadi upah jika bargaining power sangat timpang. Kebijakan harus mendorong investasi teknologi, pelatihan, dan manajemen, sekaligus memastikan pekerja memperoleh bagian wajar dari peningkatan output. Data wage-productivity gap perlu dipantau sektoral. Dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah lebih produktif jika didukung data daripada negosiasi berbasis tekanan politik semata.

17. Informalitas dan kewargaan ekonomi

Pekerja informal sering berada di luar perlindungan yang dinikmati pekerja formal: kontrak, jaminan sosial, keselamatan, dan akses kredit. Formalisasi tidak boleh semata-mata menambah kewajiban administratif. Negara perlu menawarkan value proposition: proses izin sederhana, perlindungan sosial, akses pengadaan, pembiayaan, pelatihan, dan kepastian lokasi usaha. Ketika formalitas memberi manfaat nyata, pelaku akan masuk secara sukarela. Demokrasi ekonomi menuntut bahwa status informal tidak membuat warga kehilangan perlindungan dasar.

18. Ekonomi platform dan hak digital pekerja

Platform digital menciptakan fleksibilitas dan efisiensi matching, tetapi juga menggeser kontrol ke algoritma. Pekerja dapat tidak mengetahui mengapa order menurun, akun dinonaktifkan, atau insentif berubah. Prinsip due process digital dapat diterapkan: pemberitahuan, alasan, kesempatan banding, dan audit keputusan otomatis. Regulasi perlu fleksibel agar tidak mematikan inovasi, tetapi hak dasar tidak boleh tergantung sepenuhnya pada terms of service sepihak. Portabilitas reputasi dapat mengurangi lock-in pekerja pada satu platform.

19. AI dan konsentrasi kemampuan

AI berpotensi meningkatkan produktivitas hampir semua sektor, tetapi distribusi manfaat tergantung akses terhadap data, komputasi, dan keterampilan. Perusahaan besar dapat mengadopsi lebih cepat daripada UMKM. Jika kesenjangan adopsi terlalu besar, AI memperlebar productivity dispersion. Pemerintah dapat membangun shared AI infrastructure, voucher adopsi untuk UMKM, pusat konsultasi, serta kurikulum manajemen berbasis AI. Fokus bukan hanya coding; manajer perlu mampu mengidentifikasi use case, menghitung ROI, mengelola risiko, dan redesign proses kerja. Demokratisasi AI berarti memperluas kemampuan, bukan membatasi teknologi.

20. Data governance dan trust

Transformasi digital pemerintah membutuhkan kepercayaan. Warga lebih bersedia membagikan data bila memahami tujuan, keamanan, dan hak koreksi. Pelanggaran data dapat merusak legitimasi seluruh proyek digital. Oleh karena itu privacy by design dan cybersecurity harus dianggap sebagai bagian dari pelayanan, bukan biaya tambahan. Audit akses internal penting karena ancaman tidak hanya datang dari peretas eksternal. Setiap sistem kritis perlu memiliki log, segregasi kewenangan, dan incident response. Demokrasi ekonomi digital bergantung pada kemampuan warga mempertahankan kendali yang wajar atas identitas dan data mereka.

21. Media, algoritma, dan pembentukan preferensi

Kekuasaan tidak hanya menentukan pilihan yang tersedia, tetapi juga membentuk apa yang dianggap penting. Dalam era media sosial, algoritma rekomendasi mengatur visibilitas. Isu ekonomi kompleks dapat kalah oleh konten emosional. Pemerintah dan perusahaan platform perlu menjaga transparansi iklan politik, labeling konten bersponsor, dan akses peneliti terhadap data agregat. Literasi media menjadi bagian dari economic citizenship karena warga membuat keputusan tentang pajak, subsidi, investasi publik, dan regulasi berdasarkan informasi yang mereka terima.

22. Kebebasan akademik sebagai mekanisme koreksi

Universitas menghasilkan pengetahuan yang sering tidak nyaman bagi pengambil keputusan. Namun justru karena tidak terikat pada siklus elektoral, akademisi dapat menguji asumsi jangka panjang. Pemerintah dapat membangun institutionalized dissent melalui policy lab, independent evaluation, dan competitive research grants. Akademisi juga harus menjaga integritas metodologis dan tidak mengubah kritik menjadi partisan advocacy yang mengabaikan bukti. Hubungan sehat adalah kritis sekaligus konstruktif.

23. Korupsi, persepsi, dan ekonomi investasi

Korupsi meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian, tetapi dampaknya lebih luas ketika persepsi bahwa aturan dapat dibeli menjadi normal. Transparency International Indonesia melaporkan CPI 2025 Indonesia turun ke skor 34/100. Indeks persepsi bukan ukuran sempurna, namun penurunan menjadi sinyal reputasi yang dapat memengaruhi kepercayaan. Strategi antikorupsi perlu memadukan penegakan, simplifikasi proses, transparansi, dan desain organisasi. Digitalisasi yang hanya memindahkan proses buruk ke layar tidak otomatis mengurangi korupsi; proses perlu direkayasa ulang agar discretion yang tidak perlu berkurang.

24. Pengadaan sebagai laboratorium integritas

Pengadaan adalah bidang yang sangat cocok untuk data analytics karena transaksi memiliki jejak digital. Pemerintah dapat menghitung single-bid rate, concentration ratio vendor, price variance, amendment frequency, dan network relationship. AI dapat memberi red flag, tetapi keputusan investigasi harus oleh manusia. Publikasi data dalam format terbuka juga memungkinkan civil society melakukan parallel monitoring. Efek deterrence meningkat ketika vendor memahami bahwa pola lintas proyek dapat terlihat.

25. Otonomi daerah dan eksperimentasi kebijakan

Desentralisasi memungkinkan daerah menjadi laboratorium. Satu kota dapat menguji transportasi, daerah lain digital licensing, dan provinsi lain pendidikan vokasi. Pemerintah pusat sebaiknya berperan sebagai platform penyebaran praktik baik, bukan hanya regulator. Namun eksperimentasi harus disertai evaluasi. Banyak inovasi memperoleh penghargaan tetapi tidak diketahui dampaknya. Randomized pilot atau quasi-experimental evaluation dapat digunakan untuk program tertentu. Demokrasi ekonomi lokal berkembang ketika warga melihat pemerintah daerah belajar dari data.

26. Dinasti politik dan konsentrasi ekonomi lokal

Dinasti politik tidak selalu identik dengan kinerja buruk, tetapi menciptakan risiko ketika kontrol politik keluarga bertemu kepemilikan bisnis lokal. Hambatan masuk bagi kandidat baru meningkat karena jaringan patronase, nama, dan sumber daya. Pengawasan konflik kepentingan di daerah perlu diperkuat, termasuk disclosure kepemilikan vendor, rotasi jabatan sensitif, dan open recruitment. Media lokal dan kampus daerah memiliki peran penting karena pengawasan nasional tidak dapat menjangkau semua transaksi.

27. Urbanisasi, perumahan, dan inequality of access

Kota adalah mesin produktivitas karena aglomerasi, tetapi manfaatnya hilang jika pekerja tidak mampu tinggal dekat pekerjaan. Biaya sewa dan perjalanan merupakan hidden tax pada tenaga kerja. Kebijakan perumahan harus terintegrasi dengan transportasi dan tata ruang. Penyediaan rumah murah di lokasi jauh tanpa akses kerja dapat menciptakan aset yang tidak efektif. Inclusionary zoning, rental housing, TOD, dan reformasi izin dapat memperbesar supply. Demokrasi ekonomi perkotaan diukur dari kemampuan berbagai kelas mengakses kota, bukan hanya tinggal di wilayah administrasinya.

28. Transisi energi sebagai ujian keadilan

Transisi energi akan mengubah struktur kepentingan. Industri lama memiliki pekerja dan daerah yang bergantung pada pendapatan, sementara industri baru membutuhkan keterampilan berbeda. Jika transisi dirancang hanya dari sisi target emisi, kelompok terdampak dapat menolak. Just transition membutuhkan mapping pekerjaan, jadwal penutupan, dana kompensasi, retraining, dan diversifikasi ekonomi lokal. Partisipasi pekerja sejak awal meningkatkan kualitas desain. Ini contoh bagaimana demokrasi dapat meningkatkan feasibility kebijakan lingkungan.

29. Kualitas birokrasi dan depolitisasi profesional

Negara kuat membutuhkan birokrasi profesional. Konsolidasi politik dapat menjadi masalah jika penetrasi partisan masuk terlalu jauh ke posisi teknis. Merit system, perlindungan pejabat profesional, dan evaluasi berbasis outcome menjaga continuity. Pejabat juga memerlukan ruang menyampaikan bad news kepada pimpinan tanpa takut. Organisasi yang hanya menyampaikan kabar baik mengalami information failure. Dalam pembangunan, information failure dapat jauh lebih mahal daripada perdebatan terbuka.

30. Kepemimpinan dan self-restraint

Institusi penting, tetapi kepemimpinan juga menentukan. Pemimpin demokratis yang kuat tidak hanya mampu menggunakan kewenangan, tetapi juga mampu menahan diri ketika penggunaan kewenangan mungkin legal namun merusak norma. Self-restraint menghasilkan precedent. Jika setiap pemerintah memaksimalkan seluruh celah legal untuk keuntungan jangka pendek, institusi akan terkikis tanpa satu pelanggaran besar. Dalam manajemen, hal ini serupa dengan tone at the top: budaya organisasi dibentuk oleh apa yang dicontohkan pimpinan.

31. Ketahanan pangan dan demokrasi pasar

Pangan menyentuh semua warga dan sangat politis. Kebijakan harga harus menyeimbangkan konsumen dan produsen. Harga terlalu rendah merugikan petani; harga terlalu tinggi menekan rumah tangga miskin. Solusi jangka panjang adalah produktivitas, logistik, storage, informasi pasar, dan competition enforcement. Importasi dapat menjadi alat stabilisasi tetapi perlu transparansi agar tidak menciptakan rente kuota. Demokrasi ekonomi pangan berarti petani memperoleh insentif layak dan konsumen akses terjangkau.

32. Pendidikan sebagai distribusi kekuasaan masa depan

Pendidikan mendistribusikan human capital, dan karena itu mendistribusikan kekuasaan ekonomi masa depan. Ketimpangan kualitas sekolah menciptakan unequal starting line. Fokus anggaran perlu

bergeser dari input menuju learning outcomes, tetapi outcome harus dibaca bersama konteks. Guru berkualitas perlu insentif untuk daerah sulit. Teknologi dapat membantu, namun perangkat tanpa pedagogi tidak menyelesaikan masalah. Dalam era AI, kemampuan membaca, numerasi, critical thinking, dan karakter menjadi semakin penting karena tugas rutin mudah diotomatisasi.

33. Kesehatan dan productivity democracy

Kesehatan adalah hak sekaligus aset produktivitas. Rumah tangga yang menghadapi biaya kesehatan besar dapat kehilangan tabungan dan jatuh miskin. Sistem jaminan kesehatan mengurangi risiko tersebut. Tantangannya adalah kualitas, waktu tunggu, distribusi tenaga kesehatan, dan sustainability pembiayaan. Demokrasi ekonomi menuntut bukan hanya coverage administratif, tetapi akses efektif. Data outcome dan patient experience dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya lebih adil.

34. Infrastruktur dan value capture

Infrastruktur meningkatkan nilai tanah dan bisnis di sekitarnya. Jika seluruh kenaikan nilai jatuh pada pemilik lahan kebetulan, publik membiayai proyek sementara private windfall sangat besar. Land value capture dapat mengembalikan sebagian nilai melalui betterment levy, joint development, atau pajak properti. Dana tersebut dapat membiayai transportasi dan rumah terjangkau. Kebijakan ini membutuhkan data tanah dan governance kuat agar tidak menjadi alat perampasan.

35. Kebijakan nasional dan policy reversibility

Demokrasi memungkinkan pergantian pemerintah, sehingga kebijakan harus cukup robust untuk bertahan dari pergantian. Proyek yang hanya bergantung pada patronase personal rentan dibatalkan. Proyek yang memiliki studi kelayakan, dukungan lintas pihak, kontrak transparan, dan manfaat publik jelas lebih resilient. Dengan demikian akuntabilitas bukan hambatan kontinuitas; ia justru meningkatkan durability kebijakan.

36. Kepercayaan sebagai modal institusional

Trust mengurangi biaya transaksi. Warga yang percaya pada institusi lebih bersedia membayar pajak, mematuhi aturan, dan menerima kebijakan sulit. Trust tidak dapat diperintahkan; ia dibangun dari konsistensi, fairness, kompetensi, dan kejujuran. Ketika pemerintah mengakui kesalahan dan memperbaikinya, trust dapat meningkat. Sebaliknya, denial terhadap masalah yang jelas memperbesar sinisme. Demokrasi ekonomi membutuhkan trust karena reformasi struktural sering memiliki biaya jangka pendek.

37. Populisme ekonomi dan batas fiskal

Kebijakan populer dapat bermanfaat, tetapi populisme bermasalah ketika manfaat jangka pendek diberikan tanpa pembiayaan berkelanjutan atau mengabaikan trade-off. Demokrasi memerlukan fiscal literacy agar publik dapat menilai janji. Pemerintah sebaiknya menerbitkan citizen budget yang menunjukkan sumber dana dan opportunity cost. Media dan universitas juga perlu membantu menjelaskan bahwa setiap rupiah memiliki alternatif penggunaan.

38. Nasionalisme ekonomi yang produktif

Nasionalisme ekonomi dapat menjadi kekuatan mobilisasi untuk industrialisasi, tetapi perlu diarahkan pada capability building. Menggantikan impor tanpa produktivitas dapat meningkatkan biaya

konsumen. Sebaliknya, strategi yang membangun supplier domestik, R&D, talenta, dan ekspor menciptakan kemandirian yang nyata. Ukuran nasionalisme produktif adalah kemampuan bersaing, bukan sekadar kepemilikan formal.

39. Geopolitik dan diversifikasi ketergantungan

Indonesia berpeluang memanfaatkan rivalitas kekuatan besar untuk menarik investasi. Namun ketergantungan berlebihan pada satu sumber modal, teknologi, atau pasar menciptakan vulnerability. Strategi hedging ekonomi membutuhkan diversifikasi investor, standard contract, dan kemampuan negosiasi teknis. Transparansi membantu mencegah geopolitik menjadi alasan untuk bypass governance.

40. Indonesia Emas 2045 sebagai proyek institusional

Visi 2045 biasanya diukur dengan pendapatan per kapita, industrialisasi, dan kualitas SDM. Namun status negara maju juga membutuhkan institusi yang mampu mengelola konflik secara damai, mengoreksi kebijakan, dan melindungi hak. Jika target ekonomi dicapai melalui institusi yang rapuh, kemajuan dapat sulit dipertahankan. Karena itu visi 2045 perlu memiliki institutional milestones: kualitas pengadilan, kompetisi politik, integritas pengadaan, efektivitas birokrasi, persaingan usaha, serta mobilitas sosial. Pembangunan yang matang adalah pembangunan yang tidak terlalu bergantung pada siapa yang sedang memimpin.

Agenda Penelitian dan Indikator untuk Memantau Demokrasi Ekonomi

Agenda Riset 1. Indeks konsentrasi bisnis-politik

Mengembangkan basis data keterkaitan beneficial ownership perusahaan dengan pejabat, kandidat, dan keluarga dekat secara legal dan etis. Tujuannya bukan menuduh konflik, tetapi memetakan exposure dan memungkinkan recusal. Indeks dapat dibedakan per sektor agar terlihat apakah industri rent-rich memiliki keterhubungan lebih tinggi. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 2. Dashboard kompetisi pengadaan

Mengukur jumlah bidder, single-bid rate, concentration ratio pemenang, perubahan nilai kontrak, dan hubungan beneficial ownership. Analisis longitudinal dapat menunjukkan apakah digital procurement benar-benar meningkatkan kompetisi. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 3. Indeks mobilitas sosial daerah

Menggabungkan kualitas sekolah, akses perguruan tinggi, pekerjaan formal pertama, upah pemula, dan kepemilikan rumah. Perbandingan daerah dapat membantu mengidentifikasi kebijakan yang membuka tangga mobilitas. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei,

wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 4. Peta kualitas pekerjaan

Melampaui TPT dengan mengukur upah riil, kepastian kontrak, perlindungan sosial, jam kerja, mismatch kompetensi, dan peluang pelatihan. Indikator ini penting untuk menilai apakah pertumbuhan menghasilkan economic security. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 5. Indeks akses UMKM ke rantai nilai

Mengukur proporsi pengadaan perusahaan besar dan pemerintah yang berasal dari UMKM, survival rate setelah tiga tahun, peningkatan produktivitas, dan transisi mikro-ke-kecil-ke-menengah. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 6. Indeks demokrasi data

Menilai keterbukaan, machine-readability, update frequency, privacy protection, mekanisme koreksi, dan penggunaan data publik. Data yang terbuka tetapi buruk kualitasnya tidak cukup; data yang berkualitas tetapi tertutup juga membatasi accountability. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 7. Indeks konflik kepentingan kelembagaan

Memeriksa apakah kementerian, daerah, BUMN, dan regulator memiliki aturan disclosure, recusal, cooling-off, gift policy, dan audit. Fokusnya institutional readiness, bukan kasus individual. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 8. Indeks partisipasi substantif

Membedakan konsultasi simbolik dari partisipasi yang benar-benar mengubah desain. Dapat diukur dari timing konsultasi, keterwakilan stakeholder, publikasi respons pemerintah, dan perubahan kebijakan setelah masukan. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 9. Wealth and asset survey

Mengembangkan data distribusi kekayaan, utang, properti, aset usaha, dan aset finansial. Survei memungkinkan analisis intergenerational wealth dan vulnerability yang tidak terlihat dalam pengeluaran. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 10. AI adoption gap

Mengukur perbedaan penggunaan AI antara perusahaan besar, UMKM, pemerintah daerah, sekolah, dan universitas. Intervensi dapat ditargetkan pada sektor dengan potential productivity gain tinggi tetapi adoption rendah. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 11. Indeks media pluralism ekonomi

Memetakan kepemilikan media, konsentrasi iklan, jangkauan platform digital, dan akses publik terhadap jurnalisme lokal. Tujuannya memahami struktur pasar informasi, bukan menilai isi editorial. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 12. Transition vulnerability map

Mengidentifikasi kabupaten dan kelompok pekerja yang paling rentan terhadap transisi energi, otomasi, dan perubahan perdagangan. Peta digunakan untuk preventive reskilling sebelum shock terjadi. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 13. Generational fiscal account

Mengestimasi bagaimana kebijakan utang, pensiun, kesehatan, dan SDA membagi manfaat serta beban antar generasi. Analisis ini membuat isu intergenerational justice lebih konkret. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 14. Policy capture risk assessment

Setiap regulasi bernilai ekonomi besar dapat dinilai berdasarkan konsentrasi penerima manfaat, discretionary power, transparency, entry barriers, dan lobbying exposure. Skor risiko mendorong

mitigation sebelum aturan berlaku. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Agenda Riset 15. Institutional resilience score

Mengukur seberapa jauh kebijakan dan organisasi tetap berfungsi ketika terjadi pergantian pemimpin. Indikator mencakup prosedur terdokumentasi, data continuity, merit staffing, audit, dan independent oversight. Penelitian dapat dilakukan melalui kombinasi data administratif, survei, wawancara, network analysis, dan studi kasus komparatif. Prinsip utama adalah menghasilkan indikator yang dapat direplikasi serta dibuka metodologinya agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendebatkan hasil berdasarkan bukti yang sama.

Pendalaman Teoretis dan Kebijakan: Lima Belas Pertanyaan Strategis

1. Apakah negara yang kuat selalu mengancam demokrasi?

Tidak. Dalam sejarah pembangunan, negara yang memiliki birokrasi kompeten, kemampuan memungut pajak, koordinasi lintas sektor, dan penegakan regulasi justru diperlukan untuk menghasilkan layanan publik serta transformasi struktural. Demokrasi dapat gagal jika negara terlalu lemah untuk menegakkan aturan. Persoalannya adalah distinction antara state capacity dan power concentration. State capacity berarti kemampuan institusi menjalankan mandat berdasarkan aturan; power concentration berarti keputusan semakin bergantung pada sedikit aktor. Keduanya dapat bergerak bersama, tetapi tidak harus. Negara demokratis yang matang berupaya menaikkan kapasitas sambil menyebarkan kontrol: birokrasi profesional, parlemen kuat, pengadilan independen, audit efektif, media bebas, serta mekanisme partisipasi. Dalam konteks Indonesia, agenda hilirisasi, transisi energi, ketahanan pangan, dan digitalisasi memang membutuhkan koordinasi nasional. Karena itu kritik terhadap konsolidasi tidak boleh menjadi anti-negara. Yang dibutuhkan adalah institutionalized restraint. Semakin besar kewenangan untuk mempercepat keputusan, semakin besar kebutuhan disclosure, audit, dan review. Prinsip ini mirip governance perusahaan: CEO memerlukan authority untuk bertindak, tetapi dewan, audit committee, dan disclosure menjaga authority tidak berubah menjadi abuse. Dengan analogi tersebut, demokrasi ekonomi menuntut executive capacity yang tinggi sekaligus assurance system yang kuat.

2. Mengapa demokrasi ekonomi tidak identik dengan pemerataan pendapatan?

Pemerataan pendapatan adalah salah satu outcome, tetapi demokrasi ekonomi lebih luas. Dua masyarakat dapat memiliki Gini yang sama namun berbeda dalam kesempatan usaha, kebebasan berserikat, akses kredit, kepemilikan aset, atau rule of law. Demokrasi ekonomi menilai process dan agency. Warga perlu memiliki kemampuan memilih pekerjaan, pindah perusahaan, membentuk organisasi, memulai usaha, mengakses informasi, dan menantang keputusan yang merugikan. Oleh karena itu kebijakan redistribusi melalui pajak dan transfer perlu dilengkapi structural inclusion. Pendidikan berkualitas memperluas human capital; competition policy membuka pasar; reforma agraria memperkuat asset base; transportasi publik memperluas labor market; dan digital access memperluas

informasi. Redistribusi tanpa agency dapat menciptakan ketergantungan, sedangkan pasar tanpa redistribusi dapat menghasilkan ketimpangan ekstrem. Demokrasi ekonomi mencari kombinasi keduanya: safety net yang menjamin dignity dan opportunity structure yang memungkinkan advancement. Dalam konteks Indonesia, penurunan kemiskinan penting, tetapi kualitas pekerjaan dan mobilitas sosial menjadi indikator berikutnya. Kebijakan harus menanyakan berapa banyak rumah tangga yang naik kelas secara berkelanjutan, bukan hanya berapa banyak yang melewati garis statistik.

3. Bagaimana menilai apakah koalisi politik terlalu dominan?

Tidak ada ambang numerik universal yang menyatakan koalisi tertentu terlalu besar. Penilaian perlu melihat fungsi institusi. Pertama, apakah parlemen masih melakukan scrutiny terhadap anggaran dan regulasi? Kedua, apakah komisi dapat memanggil pejabat dan memperoleh data? Ketiga, apakah oposisi memiliki akses proporsional terhadap agenda dan informasi? Keempat, apakah media dan masyarakat sipil dapat mengkritik tanpa tekanan? Kelima, apakah pengadilan dan lembaga pengawas mampu membuat keputusan yang tidak populer bagi pemerintah? Koalisi dominan menjadi problematik ketika dominance mengurangi contestability dan feedback. Dari sisi ekonomi, risiko meningkat pada kebijakan dengan concentrated benefits dan diffuse costs karena publik sulit melihat siapa yang diuntungkan. Misalnya insentif pajak sektor tertentu mungkin memiliki biaya fiskal besar tetapi manfaat terkonsentrasi. Jika scrutiny lemah, kebijakan semacam itu bertahan tanpa evaluasi. Solusi bukan memaksakan fragmentasi, melainkan memperkuat procedural opposition melalui hearing, minority reports, public consultation, sunset clause, dan mandatory evaluation.

4. Apa hubungan oligarki dengan demokrasi elektoral?

Oligarki dan demokrasi tidak selalu mutually exclusive. Pemilu dapat kompetitif sementara kekayaan sangat terkonsentrasi. Aktor kaya dapat bersaing satu sama lain, mendukung kandidat berbeda, dan tetap menerima prosedur demokratis karena pemilu memberi legitimasi. Dalam situasi ini, warga memiliki pilihan tetapi pilihan yang tersedia dapat sangat dipengaruhi struktur pembiayaan. Winters menekankan bahwa oligarki terkait dengan wealth defense, sedangkan studi Indonesia menunjukkan elite ekonomi dapat beradaptasi pada sistem elektoral. Pertanyaan penting bukan apakah semua kebijakan dikendalikan oligark, melainkan apakah kekayaan memberikan political return yang terlalu tinggi. Jika setiap tambahan kekayaan secara signifikan meningkatkan kemampuan memengaruhi kebijakan, demokrasi ekonomi melemah. Kebijakan disclosure, antimonopoly, tax enforcement, campaign finance, dan media pluralism berfungsi mengurangi conversion rate dari economic power menjadi political power. Demokrasi tidak harus menghapus elite ekonomi, tetapi perlu mencegah kekayaan menjadi tiket eksklusif menuju pengaruh.

5. Bisakah hilirisasi sekaligus memperkuat demokrasi ekonomi?

Bisa, jika hilirisasi didesain sebagai strategy of capability diffusion. Pemerintah perlu melihat setiap proyek sebagai ekosistem pembelajaran. Investor besar menjadi anchor, tetapi keberhasilannya diukur dari seberapa jauh pemasok lokal memenuhi standar, pekerja memperoleh skill, universitas terhubung dengan R&D, dan daerah membangun basis pajak serta infrastruktur. Kontrak dapat memuat target training, local procurement yang realistis, reporting lingkungan, dan technology partnership. Pemerintah juga perlu menghindari local content yang hanya formal karena dapat menciptakan shell supplier. Supplier development harus fokus pada kemampuan teknis. Hilirisasi yang demokratis juga memerlukan

mekanisme bagi masyarakat terdampak untuk memperoleh kompensasi dan benefit-sharing. Dengan demikian value added menjadi value distributed. Jika strategi hanya mengejar volume investasi, konsentrasi ekonomi dapat meningkat meskipun indikator ekspor membaik.

6. Apakah investasi asing mengurangi kedaulatan ekonomi?

Investasi asing dapat meningkatkan atau mengurangi kedaulatan tergantung bargaining capacity. Kedaulatan bukan berarti menolak modal eksternal, tetapi kemampuan menetapkan kepentingan nasional dalam hubungan saling tergantung. Negara dengan institusi kuat dapat menarik investor berbeda, menetapkan aturan konsisten, memungut pajak, menegakkan lingkungan, dan memperoleh transfer pengetahuan. Negara yang sangat bergantung pada satu investor atau satu pasar memiliki bargaining position lebih lemah. Karena itu strategi Indonesia sebaiknya diversifikasi dan standardisasi. Kesepakatan khusus yang terlalu berbeda antar investor dapat membuka ruang lobbying. Transparansi insentif dan benchmarking internasional membantu negosiasi. Dalam jangka panjang, kedaulatan meningkat ketika perusahaan domestik mampu menjadi partner teknologi dan eksportir, bukan ketika semua aset harus dimiliki negara.

7. Mengapa kualitas pekerjaan lebih penting daripada angka pengangguran saja?

Tingkat pengangguran mengukur siapa yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, namun tidak menggambarkan apakah pekerjaan yang tersedia memberi pendapatan layak, stabilitas, proteksi, dan kesempatan belajar. Ekonomi dengan TPT rendah dapat memiliki underemployment tinggi atau banyak pekerjaan informal berproduktivitas rendah. BPS Februari 2026 menunjukkan perbaikan TPT, tetapi diskusi perlu dilanjutkan pada upah dan kualitas. World Bank 2026 juga menyoroti persoalan struktural job quality dan wage stagnation. Demokrasi ekonomi membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan economic independence. Jika pekerja selalu satu guncangan dari kemiskinan, bargaining power terhadap pemberi kerja dan patron politik rendah. Indikator quality of work dapat mencakup upah riil, jam kerja, perlindungan sosial, kontrak, occupational safety, training, dan progression. Kebijakan industrial harus ditautkan dengan job quality target, bukan hanya jumlah tenaga kerja.

8. Bagaimana AI dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi ekonomi?

AI memperkuat demokrasi ekonomi jika menurunkan biaya akses pengetahuan, membantu UMKM melakukan analisis pasar, memperluas pendidikan, dan meningkatkan layanan publik. Sebaliknya, AI dapat melemahkannya jika kemampuan komputasi dan data terkonsentrasi, keputusan otomatis tidak dapat dibantah, atau pekerja kehilangan bargaining power. Karena itu governance AI perlu sekaligus pro-innovation dan pro-inclusion. Pemerintah dapat menyediakan cloud credit atau compute untuk riset, open model bahasa lokal, sandbox regulasi, dan literasi AI. Pada sisi risiko, high-impact AI harus diaudit untuk bias, keamanan, dan explainability. Warga perlu hak mengetahui ketika keputusan penting dibuat secara otomatis. Dalam perusahaan, AI adoption perlu disertai job redesign dan reskilling agar productivity gain tidak seluruhnya berasal dari labor displacement. Tantangan manajemen adalah membagi surplus produktivitas antara pemilik modal, pekerja, dan konsumen.

9. Mengapa persaingan usaha termasuk agenda demokrasi?

Karena pasar adalah arena kekuasaan. Monopoli atau oligopoli dapat memberi perusahaan kemampuan menetapkan syarat kepada konsumen, pekerja, pemasok, bahkan pemerintah. Persaingan

menciptakan exit option: konsumen dapat pindah, pekerja memiliki alternatif, pemasok tidak bergantung pada satu pembeli. Exit option meningkatkan bargaining power. Oleh sebab itu antitrust tidak hanya soal harga tetapi distribusi kekuasaan. Dalam ekonomi platform, kekuasaan dapat berasal dari data dan network effects. Indonesia perlu memperbarui analisis pasar agar menangkap zero-price services, ecosystem lock-in, dan self-preferencing. Kebijakan persaingan yang kuat juga melindungi inovator lokal dari praktik eksklusif. Demokrasi ekonomi di pasar berarti tidak ada aktor yang terlalu kuat untuk ditantang.

10. Apa peran pajak dalam demokrasi ekonomi?

Pajak membentuk hubungan kewargaan. Ketika warga membayar pajak, mereka memiliki dasar moral dan politik untuk menuntut layanan serta akuntabilitas. Negara yang terlalu bergantung pada rente sumber daya dapat memiliki hubungan fiskal yang lebih lemah dengan warga. Indonesia telah memperluas basis pajak, tetapi tantangan keadilan dan compliance tetap penting. Sistem pajak perlu sederhana bagi UMKM, tegas terhadap avoidance, dan transparan tentang penggunaan dana. Citizen budget dapat menjelaskan bagaimana pajak menjadi sekolah, rumah sakit, transportasi, dan perlindungan sosial. Jika pembayar pajak melihat pemborosan atau privilege, willingness to comply turun. Dengan demikian tax morale bergantung pada governance.

11. Mengapa transparansi belum tentu menghasilkan akuntabilitas?

Data yang dipublikasikan tidak otomatis digunakan. Transparansi memerlukan tiga hal tambahan: intelligibility, intermediaries, dan consequences. Informasi harus mudah dipahami; jurnalis, akademisi, auditor, dan organisasi sipil perlu kemampuan menganalisis; dan harus ada mekanisme tindak lanjut ketika masalah ditemukan. Portal pengadaan dengan jutaan baris data tanpa analytical tool mungkin secara formal transparan tetapi praktis sulit diawasi. Pemerintah dapat menyediakan dashboard dan API, sementara universitas mengembangkan civic analytics. Akuntabilitas juga memerlukan protection bagi whistleblower dan jalur complaint yang aman. Dengan demikian open government bukan sekadar upload dokumen, melainkan ekosistem penggunaan informasi.

12. Bagaimana menghindari politisasi bansos?

Bantuan sosial sah sebagai kebijakan redistribusi dan stabilisasi. Masalah muncul jika penerima menganggap bantuan merupakan pemberian pribadi pejabat atau partai. Sistem perlu menegaskan bahwa bansos adalah hak berbasis kriteria dan dibayar dari anggaran publik. Branding program sebaiknya institusional, bukan personal. Data penerima harus dikelola profesional dan dapat dikoreksi. Menjelang pemilu, rule mengenai perubahan program dan komunikasi dapat diperketat agar tidak menjadi electoral instrument. Transparansi jadwal dan formula mengurangi discretion. Di sisi lain, birokrasi tidak boleh terlalu takut politisasi sehingga bantuan terlambat ketika krisis. Kuncinya adalah rule-based responsiveness.

13. Apa arti demokrasi ekonomi bagi pemerintah daerah?

Pemerintah daerah paling dekat dengan izin usaha, pasar, sekolah, puskesmas, jalan lokal, dan tata ruang. Karena itu kualitas demokrasi ekonomi sangat ditentukan level lokal. Daerah dapat memperluas akses melalui one-stop service, pengadaan UMKM, transportasi, vocational partnership, dan open budget. Namun risiko capture juga tinggi karena jaringan elite lebih rapat. Disclosure hubungan bisnis,

rotasi petugas izin, digital queue, serta citizen oversight dapat mengurangi risiko. Pemerintah pusat dapat memberi insentif melalui transfer berbasis integritas dan outcome. Kompetisi antar daerah untuk menarik investasi sebaiknya bukan race to the bottom dalam pajak dan lingkungan, tetapi race to the top dalam layanan dan governance.

14. Bagaimana universitas dapat menjaga jarak kritis sekaligus membantu pemerintah?

Universitas dapat menjadi partner pembangunan tanpa kehilangan independensi. Kuncinya adalah transparansi pendanaan, kebebasan publikasi, dan metodologi. Kontrak riset pemerintah sebaiknya tidak memberi hak untuk menekan hasil. Akademisi perlu membedakan evidence, interpretation, dan advocacy. Pemerintah dapat meminta evaluasi kebijakan tetapi menerima kemungkinan hasil negatif. Dalam pendidikan manajemen, mahasiswa perlu dilatih membaca data publik dan menyusun policy memo dengan alternatif, bukan hanya rekomendasi tunggal. Hubungan kritis-konstruktif ini meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus relevansi universitas.

15. Apa indikator paling penting menuju Indonesia Emas 2045?

PDB per kapita tetap penting, tetapi tujuan pembangunan perlu balanced scorecard nasional. Perspektif prosperity dapat mencakup produktivitas dan pendapatan median; inclusion mencakup mobilitas, Gini, poverty vulnerability, dan asset ownership; institution mencakup rule of law, corruption control, competition, dan bureaucratic quality; sustainability mencakup emisi, biodiversity, dan resilience; democracy mencakup kebebasan sipil, electoral integrity, participation, serta media pluralism. Tidak semua indikator harus dijadikan target numerik yang kaku, tetapi dashboard mencegah pemerintah mengejar satu tujuan dengan mengorbankan lainnya. Indonesia Emas sebaiknya dipahami sebagai mature society: kaya, kompeten, adil, demokratis, dan mampu mengoreksi diri.

Matriks Naratif Kebijakan: Dari Risiko Konsolidasi Menuju Institusi Inklusif

Pembiayaan politik dan integritas kebijakan

Risiko utama dalam pembiayaan politik bukan hanya transaksi ilegal, melainkan ketergantungan struktural kandidat dan partai kepada sumber dana terbatas. Ketergantungan ini dapat mengubah prioritas kebijakan bahkan ketika tidak ada perintah eksplisit dari donor. Reformasi perlu menyasar supply dan demand pembiayaan. Pada sisi supply, sumber dana harus diperluas melalui iuran anggota, pendanaan publik yang proporsional, dan kontribusi kecil digital. Pada sisi demand, biaya kampanye perlu ditekan melalui pembatasan alat peraga, transparansi iklan digital, standarisasi pelaporan, dan pengawasan belanja. Audit tidak boleh hanya memeriksa kesesuaian administratif, tetapi juga kewajaran ekonomi. Misalnya, nilai jasa kampanye yang dilaporkan jauh di bawah harga pasar dapat menunjukkan in-kind contribution. Data donor perlu dapat dicocokkan dengan data vendor, penerima konsesi, dan kepemilikan perusahaan. Pengawasan semacam ini harus memiliki safeguards agar tidak dipakai untuk menekan oposisi. Karena itu badan pengawas perlu independensi prosedural, aturan yang jelas, dan publikasi keputusan. Tujuan akhirnya adalah membangun political market yang entry barrier-nya lebih rendah sehingga kompetensi dan gagasan memiliki bobot lebih besar daripada kemampuan menghimpun modal.

Kebijakan persaingan dan industrialisasi nasional

Indonesia membutuhkan perusahaan besar untuk bersaing global, tetapi kebutuhan skala tidak boleh dijadikan alasan bagi proteksi permanen. Sebuah perusahaan nasional yang dilindungi dari kompetisi dapat membesar tanpa menjadi produktif. Kebijakan industri sebaiknya memakai model reciprocal control mechanism: negara memberikan insentif, perusahaan memenuhi target. Target dapat berupa ekspor, investasi R&D, pengembangan pemasok, efisiensi energi, atau pelatihan tenaga kerja. Jika target gagal tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dukungan dikurangi. Pendekatan ini membedakan strategic nurturing dari rent protection. KPPU perlu dilibatkan dalam penilaian kebijakan industri agar insentif tidak menutup pasar bagi pendatang baru. Dalam kasus natural monopoly, fokus bergeser ke regulation of conduct, service quality, dan access pricing. Demokrasi ekonomi tidak menolak konsentrasi yang lahir dari efisiensi, tetapi menolak konsentrasi yang dipertahankan oleh privilege. Dengan mekanisme ini, nasionalisme ekonomi berubah menjadi agenda capability, bukan sekadar kepemilikan.

Reformasi BUMN dan akuntabilitas publik

BUMN perlu governance yang mengakui kompleksitas mandat. Satu perusahaan bisa diminta mengejar laba, membangun infrastruktur, menjaga harga, dan menyerap tenaga kerja sekaligus. Konflik tujuan tersebut harus diurai. Pemerintah sebagai pemegang saham perlu menerbitkan statement of corporate intent yang menjelaskan target komersial dan target publik. Public service obligation harus memiliki kontrak, indikator, serta kompensasi. Penugasan investasi strategis perlu disertai analisis risiko dan sumber pembiayaan. Jika perusahaan mengambil utang, publik perlu mengetahui apakah risiko pada akhirnya berada di neraca negara. Dewan komisaris harus memiliki kompetensi sektoral dan fungsi audit yang nyata. Mekanisme nominasi yang lebih transparan dapat mengurangi persepsi bahwa posisi BUMN merupakan perpanjangan koalisi. BUMN yang profesional dapat menjadi aset demokrasi ekonomi karena laba dan kapasitasnya dipakai untuk kepentingan publik; BUMN yang tidak transparan dapat menjadi titik konsentrasi kekuasaan ekonomi yang sulit diawasi.

Reforma birokrasi dan kualitas keputusan

Konsolidasi kebijakan membutuhkan birokrasi yang mampu memberikan nasihat profesional, termasuk ketika analisisnya tidak sesuai preferensi politik. Birokrasi yang terlalu politis berisiko menghasilkan yes-men organization. Reformasi perlu menjaga merit recruitment, career protection, dan mobility berbasis kompetensi. Pejabat tinggi harus dinilai dari outcome dan integritas, bukan hanya loyalty. Regulatory impact assessment perlu menjadi kebiasaan, terutama untuk aturan dengan konsekuensi pasar besar. Setiap proposal sebaiknya memuat masalah, baseline, alternatif, biaya, manfaat, risiko distribusi, dan mekanisme evaluasi. Setelah kebijakan berjalan, ex-post review menentukan apakah asumsi terbukti. Siklus semacam ini mengubah birokrasi dari mesin administrasi menjadi learning organization. Dalam demokrasi ekonomi, kualitas birokrasi berfungsi sebagai penyangga agar perubahan politik tidak menghancurkan kapasitas teknis negara.

Penguatan lembaga pengawasan

Lembaga pengawasan efektif membutuhkan tiga sumber daya: kewenangan, informasi, dan independensi. Kewenangan tanpa data menghasilkan pemeriksaan lambat; data tanpa independensi menghasilkan selective enforcement; independensi tanpa accountability dapat menghasilkan lembaga yang tidak responsif. Indonesia perlu menyeimbangkan ketiganya. BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, KPPU,

OJK, dan pengawas internal memiliki mandat berbeda tetapi sering menghadapi objek yang sama dari sudut berbeda. Data sharing berbasis protokol dapat meningkatkan efektivitas tanpa mengaburkan tanggung jawab. Risk-based supervision sebaiknya mengarahkan sumber daya pada sektor dan transaksi bernilai tinggi. Publikasi temuan perlu cukup rinci agar masyarakat memahami pola, tetapi tetap menghormati proses hukum. Pengawasan yang kuat tidak berarti semua keputusan harus takut mengambil risiko; yang dibutuhkan adalah kemampuan membedakan entrepreneurial risk dari abuse.

UMKM sebagai basis demokratisasi kepemilikan

Kebijakan UMKM sering menekankan kredit, tetapi bottleneck berbeda pada tiap tahap. Usaha mikro membutuhkan legal identity dan basic bookkeeping; usaha kecil membutuhkan manajemen, standar, dan akses pasar; usaha menengah membutuhkan teknologi, profesionalisasi, dan ekspor. Satu instrumen tidak cocok untuk semua. Demokrasi ekonomi memandang UMKM sebagai jalur distribusi kepemilikan produktif. Karena itu ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah debitur, melainkan peningkatan produktivitas dan asset accumulation. Pemerintah dapat menggunakan procurement set-aside, supplier matching, export coaching, dan digital invoicing. Perusahaan besar yang menerima insentif negara dapat diwajibkan menjalankan supplier development yang terukur. Koperasi dapat menggabungkan UMKM untuk memperoleh skala dalam pembelian, logistik, dan pemasaran. Dengan demikian pelaku kecil tidak dipaksa bersaing sendirian melawan perusahaan besar, tetapi memperoleh institutional support untuk naik kelas.

Pendidikan, reskilling, dan bargaining power generasi muda

Generasi muda memasuki pasar kerja ketika AI dan otomasi mengubah permintaan keterampilan. Pendidikan tinggi tidak dapat menjamin pekerjaan hanya dengan gelar. Kurikulum perlu mengembangkan problem solving, data literacy, komunikasi, domain knowledge, dan kemampuan bekerja dengan AI. Reskilling juga harus tersedia bagi pekerja dewasa agar transisi tidak hanya menguntungkan lulusan baru. Sistem pembiayaan pelatihan dapat memakai co-investment antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Outcome perlu diukur dari penempatan, peningkatan upah, dan mobilitas, bukan jumlah sertifikat. Career information system nasional dapat menghubungkan data lowongan, kompetensi, dan gaji sehingga siswa membuat keputusan lebih informasional. Economic agency generasi muda meningkat ketika mereka memiliki pilihan karier nyata, bukan hanya menerima pekerjaan apa pun karena informasi dan kesempatan terbatas.

Perumahan dan distribusi kekayaan perkotaan

Perumahan adalah titik temu antara kesejahteraan, aset, tata ruang, dan ketimpangan generasi. Kenaikan harga properti dapat memperkaya pemilik lama tetapi menutup akses pembeli pertama. Kebijakan supply perlu mempercepat izin, meningkatkan kepadatan dekat transit, dan memanfaatkan tanah publik. Di sisi demand, subsidi harus hati-hati agar tidak hanya menaikkan harga. Rental housing berkualitas juga penting karena kepemilikan tidak selalu optimal bagi pekerja muda yang mobile. Land value capture dapat membiayai infrastruktur dan affordable housing. Transparansi transaksi dan pajak properti yang adil mengurangi spekulasi. Demokrasi ekonomi perkotaan tercapai ketika kota tetap dapat dihuni oleh guru, perawat, pekerja layanan, dan generasi muda yang membuat kota berfungsi.

Perlindungan pekerja dalam ekonomi fleksibel

Fleksibilitas tenaga kerja dapat membantu perusahaan beradaptasi, tetapi seluruh risiko tidak seharusnya dipindahkan kepada pekerja. Konsep flexicurity menawarkan kombinasi fleksibilitas perusahaan dengan jaminan pendapatan, pelatihan, dan mobilitas pekerja. Indonesia dapat mengembangkan perlindungan sosial portabel yang mengikuti individu lintas perusahaan dan status kerja. Benefit account digital dapat mengakumulasi kontribusi dari berbagai platform atau pemberi kerja. Mekanisme penyelesaian sengketa perlu murah dan cepat. Serikat pekerja juga perlu beradaptasi pada pekerja platform dan sektor baru. Demokrasi ekonomi tidak menuntut satu bentuk hubungan kerja, tetapi memastikan perubahan bentuk tidak menghapus hak dasar dan bargaining mechanism.

Desentralisasi fiskal dan kompetisi kualitas governance

Transfer fiskal dapat menjadi alat untuk mendorong inovasi daerah. Selain formula kebutuhan, sebagian insentif dapat dikaitkan dengan outcome yang sulit dimanipulasi: learning gains, penurunan stunting, waktu perizinan, transparansi pengadaan, kualitas lingkungan, dan penggunaan data. Namun insentif perlu mempertimbangkan starting point agar daerah tertinggal tidak selalu kalah. Peer learning antardaerah dapat membantu. Publikasi dashboard yang membandingkan layanan membuat warga memiliki benchmark sehingga political accountability meningkat. Dalam jangka panjang, demokrasi ekonomi daerah tumbuh ketika pemilih dapat menilai pemerintah berdasarkan outcome, bukan hanya patronage atau simbol identitas.

Tata kelola sumber daya dan lisensi sosial

Proyek ekstraktif tidak cukup memiliki legal license; ia juga memerlukan social license. Social license bukan veto absolut, melainkan tingkat penerimaan masyarakat yang lahir dari fairness, trust, dan manfaat. Konsultasi harus dilakukan sebelum keputusan irreversible. Kompensasi perlu mempertimbangkan kehilangan livelihood, bukan hanya nilai tanah. Environmental monitoring dapat melibatkan community sensor dan independent laboratory. Benefit-sharing dapat berupa revenue, saham komunitas, dana pendidikan, atau kontrak pemasok lokal. Jika masyarakat menjadi stakeholder ekonomi, konflik dapat berkurang. Namun skema partisipasi harus diawasi agar tidak dikuasai elite lokal. Demokrasi ekonomi sumber daya berarti voice dan benefit berjalan bersama.

Ekonomi digital dan kedaulatan data

Kedaulatan data tidak berarti semua data harus disimpan di dalam negeri tanpa pengecualian. Esensinya adalah kemampuan hukum dan teknis untuk mengatur data strategis, melindungi warga, dan memastikan akses ketika dibutuhkan. Data localization yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya, sementara keterbukaan tanpa kontrol menciptakan risiko. Pendekatan berbasis klasifikasi lebih tepat: data publik, data pribadi biasa, data sensitif, dan data strategis memiliki aturan berbeda. Cross-border transfer dapat menggunakan standard contractual clauses dan adequacy assessment. Pemerintah perlu memastikan vendor cloud tidak menciptakan lock-in yang menyulitkan migrasi. Open standards dan interoperability adalah instrumen demokrasi ekonomi karena menjaga pilihan organisasi publik dan swasta.

AI publik dan prinsip human-centered governance

Penggunaan AI oleh pemerintah harus dimulai dari masalah pelayanan, bukan dari keinginan mengikuti tren. Setiap use case perlu business case dan risk classification. AI untuk chatbot informasi berisiko lebih rendah daripada AI yang menentukan kelayakan bansos atau profiling penegakan hukum. Untuk keputusan berisiko tinggi, human review harus bermakna, bukan sekadar rubber stamp. Model perlu diuji pada kelompok demografis dan daerah berbeda. Warga yang dirugikan harus dapat meminta penjelasan dan koreksi. Procurement AI juga harus menghindari vendor lock-in dan menyimpan hak audit. Jika dikelola demikian, AI dapat meningkatkan state capacity sekaligus mempertahankan due process.

Budaya integritas dalam organisasi publik dan bisnis

Aturan formal tidak cukup jika budaya organisasi memberi sinyal bahwa hasil lebih penting daripada cara. Tone at the top menentukan apakah pegawai berani melaporkan masalah. Insentif kinerja perlu menghindari target yang mendorong manipulasi. Whistleblower system harus melindungi identitas dan memberikan feedback. Rotasi pada posisi rentan, mandatory leave, segregasi tugas, dan analytics adalah kontrol tambahan. Perusahaan swasta juga memiliki tanggung jawab karena korupsi sering melibatkan dua sisi. Collective action antiperusahaan dapat mencegah race to the bottom ketika semua merasa harus membayar untuk bersaing. Demokrasi ekonomi membutuhkan integritas di negara dan pasar.

Membangun kontrak sosial baru menuju 2045

Pada akhirnya demokrasi ekonomi adalah kontrak sosial tentang hubungan antara kontribusi, kesempatan, risiko, dan manfaat. Warga bersedia bekerja, membayar pajak, mematuhi aturan, dan menerima perubahan jika percaya sistem memberi kesempatan adil dan perlindungan ketika gagal. Perusahaan bersedia berinvestasi jika aturan stabil dan kompetisi fair. Pemerintah memperoleh legitimasi jika mampu memberikan layanan sekaligus menjelaskan trade-off. Menuju 2045, Indonesia memerlukan narasi pembangunan yang menggabungkan produktivitas dengan fairness. Pertumbuhan tinggi tetap penting karena tanpa surplus ekonomi distribusi menjadi permainan zero-sum. Namun pertumbuhan harus disertai institusi yang memungkinkan surplus tersebar melalui upah, layanan, aset, dan kesempatan usaha. Kontrak sosial tersebut tidak dibangun sekali, tetapi diperbarui melalui pemilu, anggaran, hukum, dialog sosial, dan evaluasi kebijakan. Masa depan demokrasi ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan semua aktor menjaga agar kekuasaan—politik, ekonomi, digital, dan informasi—selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada kepentingan publik.

Delapan Catatan Strategis Penutup untuk Agenda 2026-2045

1. Dari pembangunan berbasis proyek menuju pembangunan berbasis institusi

Pembangunan sering lebih mudah dikomunikasikan melalui proyek fisik karena hasilnya terlihat, memiliki jadwal, dan dapat diresmikan. Namun kualitas jangka panjang suatu negara lebih ditentukan institusi yang tidak selalu terlihat: sistem peradilan, meritokrasi birokrasi, regulasi persaingan, standar pengadaan, sistem data, kualitas sekolah, dan mekanisme koreksi kebijakan. Indonesia memerlukan keseimbangan baru antara project delivery dan institution building. Proyek yang bagus dapat gagal menghasilkan manfaat maksimal jika institusi pemeliharaan lemah; sebaliknya, institusi kuat membuat proyek yang berbeda tetap dikelola dengan standar konsisten lintas pemerintahan. Dalam demokrasi

ekonomi, institusi juga membuat manfaat tidak terlalu bergantung pada kedekatan dengan pemimpin. Akses terhadap layanan, izin, kontrak, dan keadilan harus ditentukan aturan. Karena itu setiap program strategis nasional sebaiknya memiliki institutional legacy: peningkatan kapasitas birokrasi, data, standar, kompetensi lokal, atau mekanisme governance yang tetap berfungsi setelah proyek selesai. Dengan orientasi ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan aset fisik, tetapi juga public capability.

2. Mengelola trade-off antara kecepatan dan deliberasi

Pemerintah sering menghadapi tekanan untuk bergerak cepat, terutama ketika peluang investasi memiliki jendela waktu sempit. Deliberasi dianggap memperlambat. Tetapi keputusan cepat yang salah dapat menghasilkan biaya jauh lebih besar daripada waktu konsultasi. Solusi bukan memilih salah satu, melainkan merancang fast but accountable governance. Prosedur dapat memiliki batas waktu jelas, data standar, dan parallel review. Konsultasi publik dapat difokuskan pada isu yang benar-benar material. Regulatory sandbox memungkinkan eksperimen terbatas sebelum skala penuh. Emergency procedure dapat digunakan pada krisis dengan sunset clause dan post-review. Prinsip ini relevan untuk energi, teknologi, kesehatan, dan infrastruktur. Manajemen modern mengenal agile governance: iterasi cepat tetapi feedback terus-menerus. Negara demokratis dapat menerapkan prinsip serupa selama hak dasar dan proses hukum dijaga. Dengan demikian deliberasi menjadi alat meningkatkan kualitas dan mengurangi risiko, bukan ritual administratif.

3. Mengubah transparansi menjadi kemampuan warga

Keterbukaan informasi hanya berarti bila warga mampu menggunakannya. Dokumen APBN, laporan BUMN, atau data pengadaan sering kompleks. Pemerintah perlu membangun public financial literacy melalui citizen dashboard, visualisasi, dan penjelasan sederhana. Sekolah dan universitas dapat menggunakan data publik sebagai bahan belajar sehingga generasi muda terbiasa membaca kebijakan. Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi data intermediary yang menerjemahkan informasi teknis ke kelompok lokal. Media perlu investasi pada data journalism. Negara juga dapat menyediakan API dan documentation untuk peneliti. Ketika informasi menjadi usable, akuntabilitas tidak lagi hanya bergantung pada lembaga formal. Warga, perusahaan, dan akademisi dapat menemukan anomali, menilai outcome, dan mengusulkan alternatif. Demokrasi ekonomi kemudian memiliki knowledge infrastructure yang lebih luas.

4. Mengukur keberhasilan pemerintah dengan median citizen

Rata-rata nasional dapat meningkat sementara pengalaman warga median berubah sedikit. Karena itu indikator pemerintah perlu memberi perhatian pada median income, median wage, median commute time, median housing burden, dan median learning outcome. Median lebih tahan terhadap pengaruh ekstrem dan menggambarkan pengalaman tipikal. Selain itu perlu distribusi per desil dan wilayah. Kebijakan yang menaikkan rata-rata tetapi hanya melalui kelompok teratas akan terlihat berbeda ketika median dipantau. Perspektif median citizen membantu menghubungkan statistik makro dengan legitimacy. Pemerintah dapat melaporkan annual economic security report yang menunjukkan apakah rumah tangga tipikal memiliki lebih banyak disposable income, tabungan, perlindungan, dan kesempatan. Ini bukan menggantikan PDB, tetapi melengkapi dashboard pembangunan.

5. Memperkuat organisasi perantara

Demokrasi tidak hanya terdiri dari individu dan negara. Serikat pekerja, asosiasi bisnis, koperasi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan universitas berfungsi sebagai intermediary organizations. Mereka mengagregasi kepentingan sehingga warga tidak harus bernegosiasi sendirian dengan negara atau perusahaan besar. Jika organisasi perantara lemah, politik cenderung menjadi personalistik dan klientelistik. Pemerintah sebaiknya menciptakan ruang dialog sosial yang terstruktur, tetapi tidak mengkooptasi organisasi tersebut. Pendanaan dan regulasi harus menjaga otonomi. Organisasi perantara juga perlu governance internal agar tidak berubah menjadi oligarki kecil. Demokrasi ekonomi berkembang ketika asosiasi mampu mewakili anggota secara nyata dan ikut menyusun standar kebijakan.

6. Menjadikan antikorupsi sebagai desain sistem

Pendekatan antikorupsi yang terlalu berfokus pada moral individu mengabaikan insentif. Bahkan orang berintegritas dapat berada dalam sistem yang memberi discretion tinggi, kontrol lemah, dan tekanan target. Design approach bertanya: di mana transaksi bernilai besar; siapa yang memiliki kewenangan tunggal; data apa yang tersedia; bagaimana keputusan dapat diverifikasi; dan apa konsekuensi konflik kepentingan. Digital workflow, segregation of duties, random audit, benchmark harga, dan transparent queue dapat mengurangi kesempatan. Penegakan tetap diperlukan untuk deterrence, tetapi prevention membuat sistem tidak terlalu bergantung pada heroism. Dalam demokrasi ekonomi, antikorupsi adalah cara memastikan sumber daya publik tidak dialihkan dari warga ke jaringan tertentu.

7. Menjaga pluralisme dalam strategi pembangunan

Tidak ada satu model pembangunan yang selalu benar. Hilirisasi, ekonomi digital, pertanian modern, ekonomi kreatif, manufaktur, pariwisata, dan jasa dapat memiliki peran berbeda menurut wilayah. Konsolidasi politik berisiko mendorong single narrative sehingga alternatif sulit dibahas. Pemerintah perlu memelihara policy pluralism: beberapa pilot, kompetisi ide, dan ruang bagi daerah memilih strategi. Portofolio mengurangi risiko karena kegagalan satu sektor tidak mengguncang seluruh ekonomi. Dalam manajemen strategis, diversification dan option value adalah cara menghadapi ketidakpastian. Demokrasi memperkuat option value karena memungkinkan munculnya ide dari banyak aktor. Dengan demikian pluralisme bukan hanya nilai politik, tetapi strategi resilience.

8. Menempatkan martabat manusia sebagai tujuan akhir

Pada akhirnya, demokrasi ekonomi bukan tentang indikator semata. Tujuan pembangunan adalah memperluas kemampuan manusia menjalani kehidupan yang dianggap bernilai: bekerja dengan bermartabat, membesarkan keluarga dengan aman, memperoleh pendidikan, berpartisipasi, mencipta, beribadah, berpendapat, dan menatap masa depan dengan harapan. Pertumbuhan, teknologi, investasi, dan kekuasaan negara adalah sarana. Ketika sarana berubah menjadi tujuan, kebijakan mudah kehilangan orientasi manusia. Pasal 33 UUD 1945 menggunakan frase sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; frase tersebut mengandung tuntutan moral bahwa sumber daya dan kekuasaan publik harus kembali pada manusia sebagai warga. Indonesia memiliki modal besar: demografi, sumber daya, pasar, pengalaman demokrasi, dan kapasitas negara yang terus berkembang. Tantangannya adalah menjaga agar konsolidasi kapasitas tidak menjadi konsolidasi privilege. Masa depan demokrasi ekonomi akan

ditentukan oleh keberanian membangun institusi yang memungkinkan kekuasaan digunakan secara efektif namun selalu dapat diperiksa, dibatasi, dan diarahkan kembali kepada kepentingan rakyat.

9. Mengembangkan indeks nasional demokrasi ekonomi

Indonesia akan memperoleh manfaat dari sebuah indeks nasional demokrasi ekonomi yang tidak dimaksudkan menggantikan indikator resmi, tetapi menyatukan berbagai dimensi yang saat ini tersebar. Indeks dapat dibangun dari lima pilar: akses ekonomi, distribusi aset, kualitas pekerjaan, contestability pasar, dan akuntabilitas institusional. Akses ekonomi mencakup pendidikan, kesehatan, kredit, digital connectivity, dan layanan dasar. Distribusi aset mencakup perumahan, tanah, tabungan, dan kepemilikan usaha. Kualitas pekerjaan meliputi upah riil, perlindungan sosial, stabilitas, serta kesempatan pelatihan. Contestability pasar mengukur konsentrasi industri, kemudahan masuk, pengadaan kompetitif, dan mobilitas UMKM. Akuntabilitas institusional mengukur keterbukaan anggaran, konflik kepentingan, rule of law, efektivitas pengaduan, dan kualitas partisipasi publik. Nilai indeks sebaiknya dihitung per provinsi dan diperbarui berkala agar terlihat variasi wilayah. Metodologi harus terbuka sehingga bobot dapat diperdebatkan dan diuji sensitivitasnya. Kekuatan indeks bukan pada satu angka final, melainkan pada kemampuannya memaksa pemerintah dan publik melihat hubungan antara pertumbuhan dan distribusi kekuasaan ekonomi. Jika PDB tumbuh tetapi contestability turun, dashboard akan memberi sinyal. Jika kemiskinan turun tetapi kualitas pekerjaan memburuk, indikator juga menunjukkan ketegangan. Dengan pendekatan ini, demokrasi ekonomi menjadi objek manajemen kinerja nasional yang dapat dipantau, dipelajari, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

10. Kepemimpinan transformatif dan warisan institusi

Pemimpin sering dinilai dari proyek besar, pertumbuhan, atau keberhasilan mengatasi krisis. Namun warisan paling berharga adalah institusi yang tetap bekerja ketika pemimpin telah selesai menjabat. Kepemimpinan transformatif dalam demokrasi ekonomi berarti menggunakan kekuasaan untuk membangun aturan yang bahkan membatasi penerus dan diri sendiri. Pemimpin yang memperkuat meritokrasi, keterbukaan data, audit, persaingan usaha, kebebasan akademik, serta mekanisme partisipasi sedang mengubah kapasitas pribadi menjadi kapasitas institusional. Ini memerlukan self-restraint karena manfaat politik jangka pendek kadang lebih besar jika semua kewenangan dipusatkan. Tetapi institusi yang kuat menghasilkan continuity tanpa personal dependency. Bagi Indonesia menuju 2045, kepemimpinan semacam ini penting karena tantangan lintas generasi tidak dapat diselesaikan satu periode pemerintahan. Perubahan iklim, kualitas pendidikan, produktivitas, teknologi, dan reformasi hukum memerlukan horizon panjang. Oleh sebab itu keberhasilan konsolidasi kekuasaan seharusnya dinilai dari apakah ia akhirnya mengurangi kebutuhan akan konsolidasi personal: keputusan tetap cepat karena birokrasi kompeten, investasi tetap berjalan karena hukum pasti, dan program sosial tetap tepat sasaran karena data serta sistem bekerja. Pada titik itu, negara menjadi kuat bukan karena seorang pemimpin mengendalikan semuanya, tetapi karena institusi memungkinkan jutaan warga dan organisasi bekerja dalam aturan yang dapat dipercaya. Itulah bentuk konsolidasi yang kompatibel dengan demokrasi ekonomi.

Glossarium

Demokrasi ekonomi: Tataan ekonomi yang memperluas partisipasi, kesempatan, kepemilikan, dan daya tawar warga serta memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil.

Konsolidasi kekuasaan: Proses pemusatan kapasitas pengambilan keputusan pada aktor atau koalisi tertentu; dapat produktif atau problematik tergantung checks and balances.

Oligarki: Dominasi aktor yang memiliki konsentrasi sumber daya material besar dan menggunakan sumber tersebut untuk mempertahankan kekayaan dan pengaruh.

Politico-capitalist: Aktor yang menyatukan posisi/kekuatan politik dengan kepentingan atau kepemilikan bisnis secara langsung.

State capture: Pengaruh sistematis kepentingan privat terhadap aturan, regulasi, atau keputusan negara untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Democratic backsliding: Penurunan bertahap kualitas demokrasi melalui pelemahan kompetisi, hak, kebebasan, atau checks and balances.

Rule of law: Prinsip bahwa kekuasaan publik dan privat tunduk pada hukum yang umum, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara tidak diskriminatif.

Checks and balances: Mekanisme saling mengawasi dan membatasi antar lembaga agar kekuasaan tidak terkonsentrasi tanpa koreksi.

Clientelism: Pertukaran dukungan politik dengan manfaat material atau akses yang bersifat partikularistik.

Rent-seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui pengaruh terhadap aturan atau akses istimewa, bukan melalui peningkatan produktivitas.

Competition policy: Kebijakan untuk menjaga persaingan, mencegah kartel dan penyalahgunaan posisi dominan, serta menjamin contestability.

Beneficial ownership: Identitas pihak yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan/aset, meskipun struktur legalnya menggunakan perantara.

Hilirisasi: Proses peningkatan pengolahan sumber daya domestik untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri.

Developmental state: Negara yang memiliki kapasitas birokrasi dan koordinasi tinggi untuk mendorong transformasi struktural dan industrialisasi.

Inclusive institutions: Institusi yang membuka partisipasi luas, melindungi hak, dan menyebarkan kesempatan ekonomi-politik.

Public value: Nilai yang diciptakan organisasi publik bagi masyarakat melalui outcome, legitimacy, dan kepercayaan.

Just transition: Transisi ekonomi rendah karbon yang membagi biaya dan manfaat secara adil serta melindungi pekerja dan wilayah terdampak.

Algorithmic accountability: Kewajiban memastikan sistem algoritmik dapat diaudit, adil, aman, dan menyediakan mekanisme koreksi bagi pihak terdampak.

Economic security: Kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup yang layak menghadapi guncangan pendapatan, kesehatan, atau harga.

Mobility social: Kemampuan individu/keluarga berpindah ke posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi lintas waktu atau generasi.

Daftar Pustaka (APA 7)

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown. [Buku; DOI tidak tersedia]
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505-526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137-156. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1590816>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295-317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS-Statistics Indonesia. [Laporan institusional; DOI tidak tersedia]
- Badan Pusat Statistik. (2026b, May 5). *Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah*. BPS-Statistics Indonesia. [DOI tidak tersedia]
- Badan Pusat Statistik. (2026c, August 5). *Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y)*. BPS-Statistics Indonesia. [DOI tidak tersedia]
- Badan Pusat Statistik. (2026d, August 5). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen*. BPS-Statistics Indonesia. [DOI tidak tersedia]
- Badan Pusat Statistik. (2026e, August 5). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368*. BPS-Statistics Indonesia. [DOI tidak tersedia]
- Damanik, I., Rompas, A., Nadia, Z., Berenschot, W., & Warburton, E. (2025). Business-politics relations in Indonesia: The oligarchisation of democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61(1), 39-60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417>
- Freedom House. (2026). *Freedom in the World 2026: Indonesia*. Freedom House. [Laporan institusional; DOI tidak tersedia]
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400829354>
- Slater, D., & Simmons, E. (2013). Coping by colluding: Political uncertainty and promiscuous powersharing in Indonesia and Bolivia. *Comparative Political Studies*, 46(11), 1366-1393. <https://doi.org/10.1177/0010414012453447>
- V-Dem Institute. (2026). *Democracy Report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg. [Laporan institusional; DOI tidak tersedia]
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11-33.

<https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects*, June 2026: Managing risks, maintaining momentum. World Bank.
[Laporan institusional; DOI tidak tersedia]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Catatan Penutup Penulis

Artikel ini disusun sebagai bahan akademik dan refleksi kebijakan. Angka statistik menggunakan rilis resmi yang tersedia sampai Agustus 2026. Penilaian mengenai kualitas demokrasi menggunakan sumber komparatif internasional dan literatur akademik sebagai bahan analisis, bukan sebagai satu-satunya ukuran. Pembaca dianjurkan membandingkan berbagai sumber dan mempertahankan sikap kritis terhadap asumsi, definisi, serta metodologi setiap indeks. Tujuan utama tulisan adalah mendorong diskusi tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung bersama penguatan institusi demokratis, tata kelola yang berintegritas, dan perluasan kesempatan bagi masyarakat.

Catatan metodologis tambahan: seluruh angka kontemporer dalam artikel ini perlu dibaca sebagai snapshot kebijakan pada 2026. Perubahan kondisi makroekonomi, regulasi, dan indikator demokrasi setelah tanggal rilis sumber dapat mengubah interpretasi. Karena itu pembaruan data berkala merupakan bagian penting dari evaluasi demokrasi ekonomi yang bertanggung jawab.